

PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI



RANHIR

RENCANA
STRATEGIS

2025
2029

BADAN
PENGHUBUNG
DAERAH



**JAMBI
MANTAP**
Bersama Membangun Jambi
**BERDAYA SAING
BERKELANJUTAN**

TA. 2025

KATA PENGANTAR

Pemerintahan hadir untuk menjawab solusi bagi masyarakat, Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam sistem sebuah Negara, esensinya menciptakan pembangunan yang merata keberbagai aspek dan mampu mensejahterakan masyarakat. Banyak sebab musabab Kegagalan Penyelenggaraan Pemerintah, Negara dan Pembangunan yang baik karena tidak mengindahkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dibuat dengan berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagaimana diatur pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi lebih akuntabel karena sudah terpola dan terpadu.

Jakarta, September 2025

KEPALA BADAN,



Drs. AMRULSYAH

Pembina

NIP.19700107 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	16
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	40
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	41
2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
2.7. Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	53
2.8. Penentuan Isu Strategis	55

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIAJAKAN	56
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	56
3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jamb	56
3.3. Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi ..	59
3.4. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	60
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	64
4.2. Pendanaan	66
4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	76
4.4. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	78
BAB V PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029	9
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	16
Gambar 2.2 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Jabatan Tahun 2025	20
Gambar 2.3 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Golongan Tahun 2025.....	21
Gambar 2.4 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2025	23
Gambar 2.5 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 22
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin 22
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin 24
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin 25
Tabel 2.6	Daftar Nama - nama Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 27
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin 30
Tabel 2.8	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin 31
Tabel 2.9	Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 32
Tabel 2.10	Daftar Aset Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 33

Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.....	35
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	39
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.....	58
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029	61
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	59
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	78
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, selama tahun 2025 – 2029	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma baru pemerintahan yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan prima (*Excellent Service*) dari unit-unit pemerintahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di mana salah satunya mewajibkan setiap Instansi Pemerintahan untuk menyusun Rencana Strategis.

Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi Daerah serta tujuan setiap Organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Rencana Strategis PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan 2025-2030. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka dilakukan penyelarasan terhadap kinerja dan periodisasi antara RPJMD dan RPJMN tahun 2025 - 2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029

menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Jambi yakni unsur staf yang membantu Gubernur Jambi, memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jambi yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu:

**“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**

Dengan Misi sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian

pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Rencana Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan peluang, dan tantangan yang ada, yang disusun oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.

Selanjutnya Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, akan dijabarkan kembali setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai Tahun 2029, yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

Selanjutnya Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 2025-2029 disamping menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai Tahun 2029, juga menjadi dasar penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, menjadi acuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKj) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan daripada masyarakat, *stakeholder* yang terkait dengan pemerintahan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian bidang Pemerintahan khususnya aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, bahwa pembangunan Provinsi Jambi diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerinath Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Belanja Daerah Berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, analisis standar belanja,

- dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 35);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12).
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.1.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029.

- b. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.1.2 Tujuan

Adapun Tujuan dari disusunnya Renstra ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai Tahun 2029, dan menjamin adanya konsistensi perumusan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- Sebagai dasar evaluasi penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sehingga mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.7. Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.8. Penentuan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 3.3. Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 3.4. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

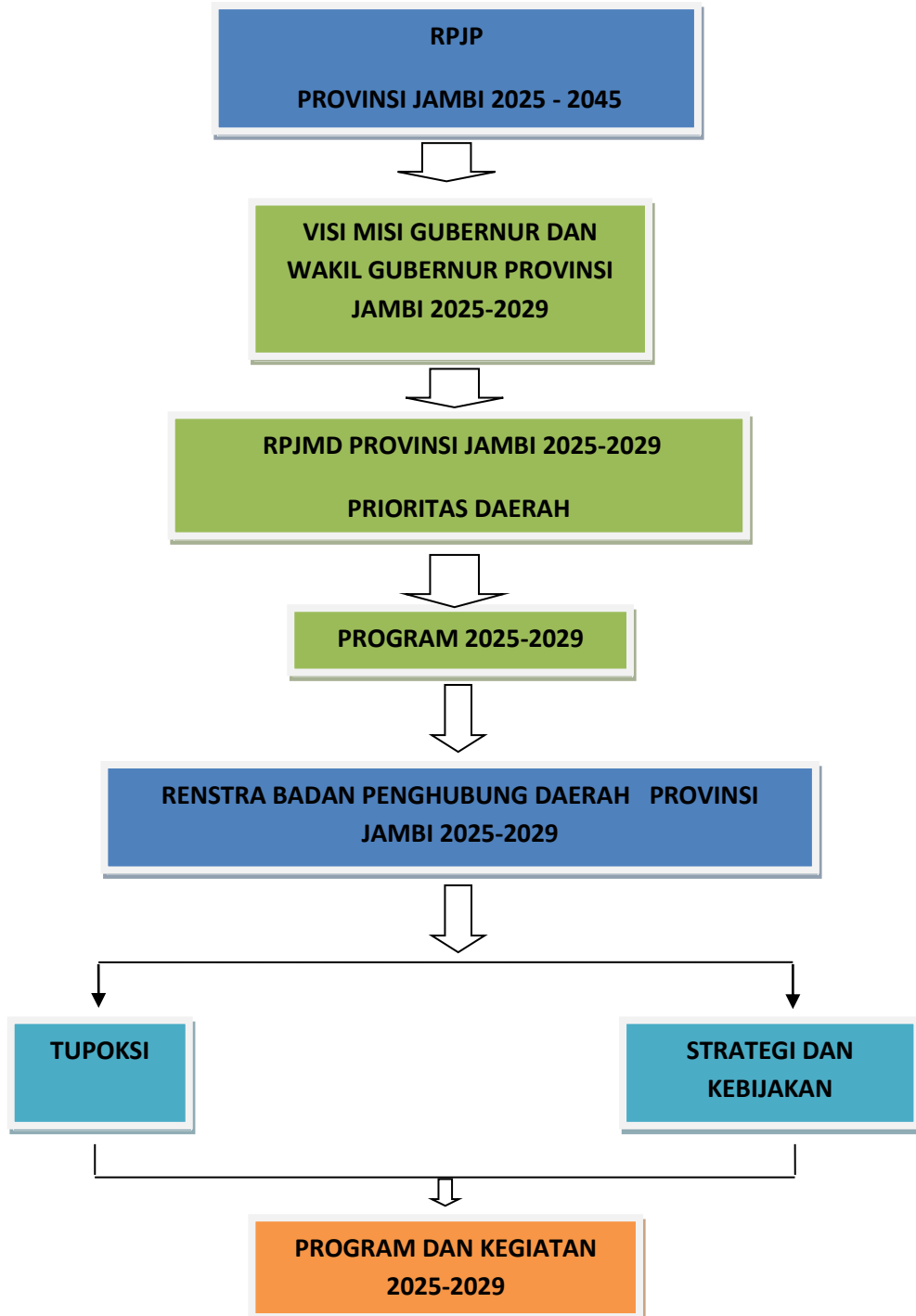
- 4.1. Rencana Program Dan Kegiatan
- 4.2. Pendanaan
- 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.4. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Gambaran kerangka pikir penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengikuti Hierarki Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada Gambar 1.1

Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029



Sumber: Bapegda Prov Jambi, April 2025 data diolah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Disebutkan pada pasal 2 bahwa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penghubung Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana tersurat pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016, yaitu:

- a. Penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen dan Swasta di Jakarta.
- b. Pembinaan Masyarakat Daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi / Luar Daerah.
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data atau Informasi.
- d. Pengadaan Kegiatan Promosi, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata.
- e. Pengelolaan Anjungan Daerah Jambi di Taman Mini Indonesia Indah.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertera dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016, terdiri dari :

1. Kepala

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi bersama Sub Bagian Tata Usaha, Subbidang Pengelolaan Mess dan Aset, Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi, Informasi dan Seni Budaya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan Administrasi Tata Naskah Dinas, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Pendistribusian Surat Menyurat dan Pengadaan.
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian, Administrasi Kenaikan Pangkat, Pelatihan, Disiplin Pegawai ASN, Mutasi, Pemberhentian, Gaji Berkala, Kartu Pegawai, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pelaksanaan Evaluasi Kehadiran dan Penilaian Kinerja dalam Pemberian Tunjangan.
- d. Pengusulan Penerima Penghargaan, Cuti, Sumpah/Janji, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai ASN;
- e. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan.
- f. Pembuatan Database Pegawai Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan Urusan Administrasi Keuangan Meliputi

- Verifikasi, Pembukuan, Perbendaharaan dan Gaji.
- h. Perencanaan dan Pengelolaan Perpustakaan.
 - i. Pengkajian, Perencanaan, Penyusunan dan Pengevaluasi Program Kerja.
 - j. Pemantauan dan Pengambilan Langkah-Langkah Pelaksanaan Evaluasi, Pelaporan dan Penyiapan Bahan Evaluasi Serta Penyusunan Laporan.
 - k. Pelaksanaan dan Penyiapan Laporan dan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
 - l. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

3. Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset

Mempunyai tugas mengelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bidang Pengelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan Pengevaluasi Standar Operasional Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, Bogor dan Luar Daerah.
- b. Penataan Dan Penginventarisir Sarana dan Prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi Di Jakarta, Bogor, Depok, dan Luar Daerah.
- c. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengambil Langkah-langkah Pelaksanaan Pemeliharaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah.

- d. Pelaksanaan Urusan Kontrol Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kartu Inventaris Barang.
- e. Pelaksanaan Urusan Promosi Mess Jambi, Peningkatan Pelayanan Dengan Sistem Pelaporan Penerimaan Mess Jambi.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

4. Sub Bidang Pelayanan Dan Hubungan Antar Lembaga

Mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Bidang Keprotokolan, Kehumasan, Akomodasi, Transportasi, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Provinsi, Lembaga-Lembaga Pemerintah Departemen/Non Departemen, Swasta dan Internasional serta Pembinaan Masyarakat Jambi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah yang berkaitan dengan Bidang Tugas dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan Program Kerja Kegiatan Keprotokolan, Kehumasan, Akomodasi dan Transportasi Serta Hubungan Antar Lembaga.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan, Kehumasan, Akomodasi dan Transportasi serta Hubungan Antar Lembaga.
- c. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi/Luar Daerah.
- e. Pengurusan, Penyiapan Kelengkapan Administrasi dan Perjalanan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan

Sekretaris Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Pelaksanaan Koordinasi Mengenai Hubungan Kerja yang sedang dan akan dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Pemerintah (Lembaga-Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen), Swasta dan Internasional.
- g. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi yang Terkait Dalam Penyediaan Maupun Penerimaan Data dan Informasi Dalam Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- h. Pemberian Bantuan Kepada Para Pejabat Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Hubungan Kerja Dengan Pemerintah (Lembaga-Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen), Swasta dan Internasional di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah.
- i. Pengumpulan dan Pengelola Data atau Informasi Tentang Masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi / Luar Daerah.
- j. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

5. Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya

Mempunyai tugas Melaksanakan Kegiatan Bidang Promosi Dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja Kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi

- Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata.
- b. Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Informasi untuk Melakukan Kegiatan Promosi Pembangunan Daerah.
 - c. Pelaksanaan Program Kerja Kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata di Tingkat Nasional dan Internasional.
 - d. Pengkoordinasi Kegiatan Anjungan Jambi dan Taman Mini Indonesia Indah.
 - e. Pelaksanaan dan Fasilitasi Kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi, Meliputi Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata Baik di Dalam dan di Luar Taman Mini Indonesia Indah.
 - f. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program dan Informasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Anjungan Jambi.
 - g. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Subbag/Subbid masing-masing. Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi



Sumber : Bapegda Prov Jambi, April 2025, data diolah

2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Penghubung Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi didukung Sumber Daya Manusia yang tersebar dalam Instansi Induk (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sampai dengan April 2025, tercatat sebanyak 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 5 orang Pejabat Struktural, 38 orang Pejabat Fungsional Umum dan 1 orang Penata Laksana Barang Terampil yang terbagi di Instansi Induk (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi), serta 43 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Total Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sampai dengan April 2025 tercatat sebanyak 87 orang.

Berdasarkan Bezetting Pegawai dan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil kondisi 31 Desember 2023, proyeksi kebutuhan pegawai Tahun 2024 berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 18 orang, dengan nomenklatur jabatan yang dibutuhkan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Gol.Ruang
			Jenjang Pendidikan	Jurusan	
1	2	3	4	5	6
1	JFT Perencana Pertama	1	S1/D4	Bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh kepala LKPP dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang perencanaan, mendapat sertifikat atau surat	III/a

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Gol.Ruan g
			Jenjang Pendidikan	Jurusan	
1	2	3	4	5	6
				tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan/ STTPL)	
2	JFT Analisis Kepegawaian Pertama	1	S1/D4	Bidang Ilmu kepegawaian, Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan	III/a
3	JFT Pranata Komputer Pertama	1	S1/D4	Sarjana Komputer/ Ilmu Komputer yang relevan dengan tugas dan jabatan yang relevan	III/a
4	JFT Arsiparis Pertama	1	S1/D4	Manajemen/ Kepegawaian/ Politik/ Administrasi/ Sosiologi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/d
5	Pengelola Keuangan	2	D3	Bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/d
6	Pengadministrasi Umum	2	SLTA/D1/D2	Manajemen perkantoran atau bidang lain yang	II/a

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Gol.Ruan g
			Jenjang Pendidikan	Jurusan	
1	2	3	4	5	6
				relevan dengan tugas dan jabatan	
7	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	1	SLTA/D1/D2	Bidang Listrik atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
8	Petugas Keamanan	6	SLTA/D1/D2	Bidang yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
9	Pengemudi	2	SLTA/D1/D2	Bidang yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
10	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	1	D3	Manajemen/Sosial/Politik/ Administrasi/ Sosiologi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/d
	Jumlah	18			

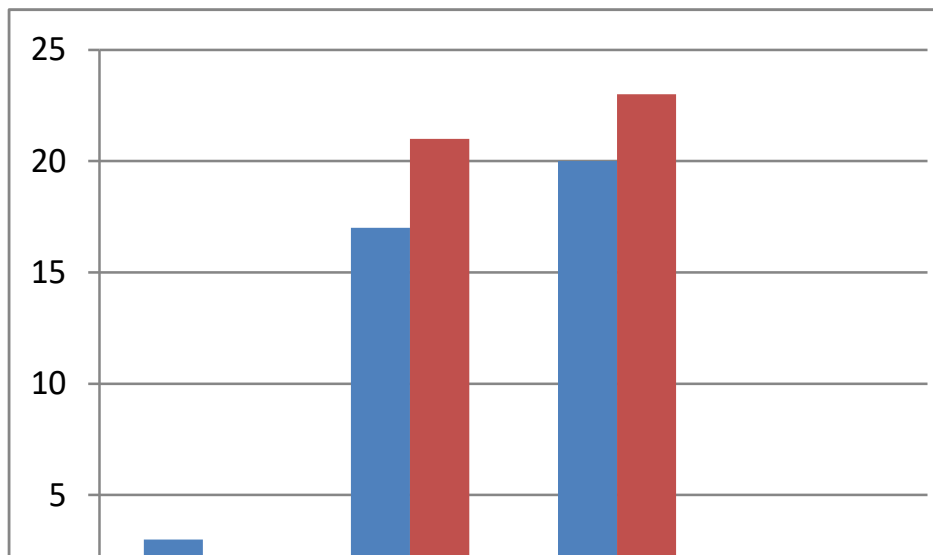
Sumber: Bapegda Prov Jambi, april 2025. Data diolah

Dengan demikian idealnya kondisi Sumber Daya Manusia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada april 2025 sebanyak 87 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 5 orang Pejabat Struktural, 1 orang Jabatan Fungsional Tertentu, 38 orang Jabatan Fungsional Umum dan 44 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terbagi di Instansi Induk (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi).

Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan Tahun 2025 dapat disajikan pada Grafik Histogram Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2

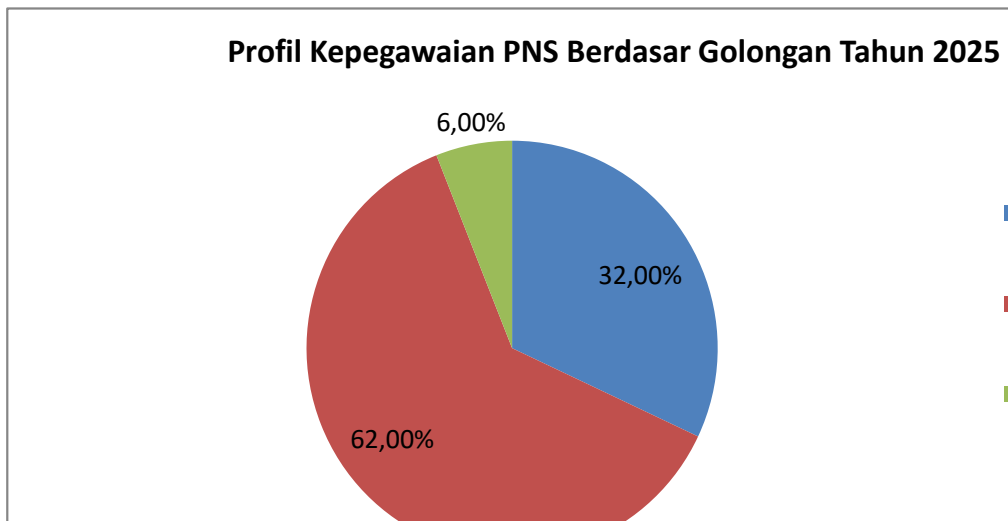
Profil Kepegawaian PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2025



Sumber: Bapegda Prov Jambi, per april 2025. Data diolah

Berdasarkan Golongan, 43 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada bulan april 2025 terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang atau 9,3 persen, Golongan III sebanyak 26 orang atau 60,5 persen, Golongan II sebanyak 13 orang atau 30,2 persen. Untuk jelasnya Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 berdasar golongan dapat disajikan pada Diagram Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3
Profil Kepegawaian PNS
Berdasarkan Golongan Tahun 2025



Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025. Data diolah

Berdasarkan Gambar 2.3 terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terutama untuk Jabatan Fungsional Umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal. Pegawai di Badan Penghubung Daerah sebagian besar merupakan pegawai Golongan III yakni sebanyak 25 orang atau 46 persen. Selanjutnya penyebaran jumlah pegawai PNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Kondisi April 2025

No.	Golongan	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I			
2	II	11	2	13
3	III	8	18	26
4	IV	2	2	4
Jumlah		21	22	43

Sumber : Bapegda Prov Jambi per april 2025 data diolah

Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin, jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terdiri dari 1 orang Eselon III a dan 4 orang Eselon IV a serta 39 orang Fungsional Umum, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.3.

Tabel.2.3

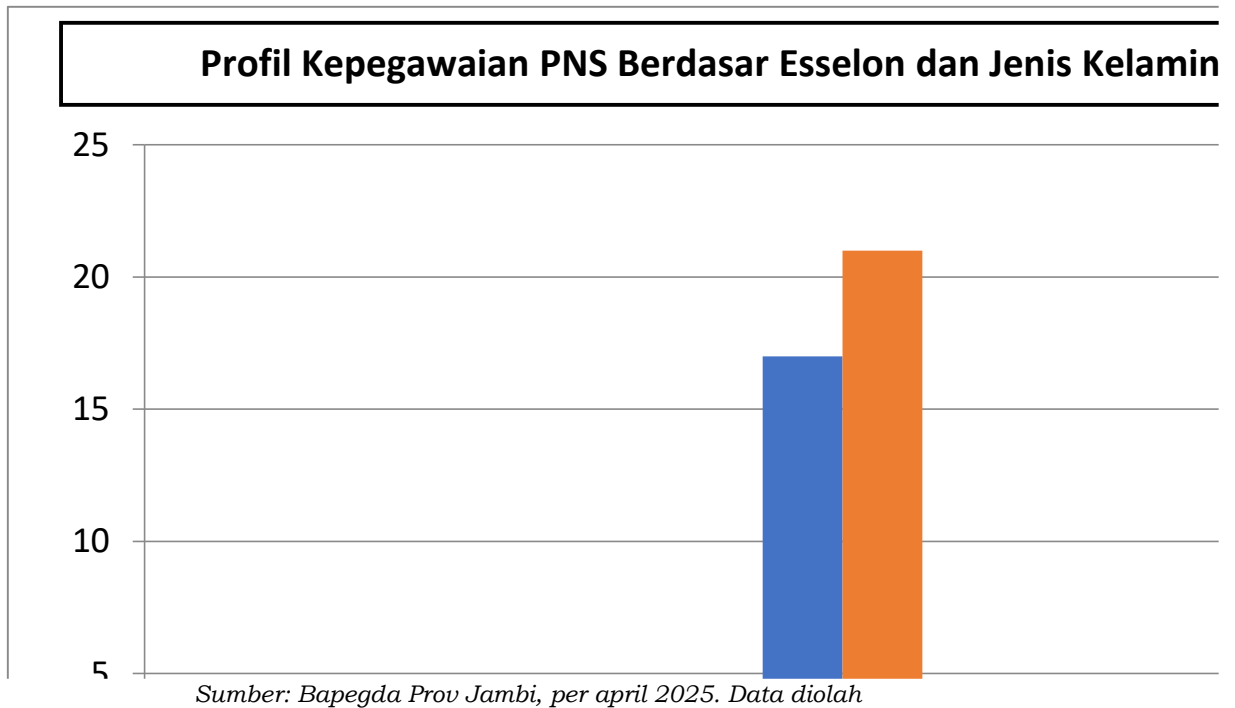
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin

No.	Eselonering	Jumlah Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	III.a	1	-	1
2.	IV.a	2	2	4
3.	Fungsional Umum	17	21	38
Jumlah		20	23	43

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025 data diolah

Profil Kepegawaian PNS berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4
 Profil Kepegawaian PNS
 Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2025



Dari Gambar 2.4 dapat dilihat bahwa di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana dari 43 orang jumlah Pegawai terdiri dari Laki-laki 20 orang (46 persen) dan Perempuan 23 orang (53,5 persen). Sedangkan yang menduduki Jabatan Struktural (Eselon) dari 4 Jabatan Struktural (Eselon) yang tersedia, di duduki 2 orang Laki-laki (20 persen) dan 2 orang Perempuan (20 persen). Demikian juga dengan Jabatan Fungsional Umum, dari 39 Pejabat Fungsional Umum terdiri dari 20 orang Laki-laki (46,5 persen) dan 23 orang Perempuan (53,5 persen). Jumlahnya seimbang sesuai dengan kondisi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi terdiridari; tamatan SLTP sebanyak 2 orang, tamatan SLTA

sebanyak 19 orang, tamatan Sarjana Muda (DIII) sebanyak 2 orang, tamatan Sarjana (S1) sebanyak 17 orang dan tamatan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

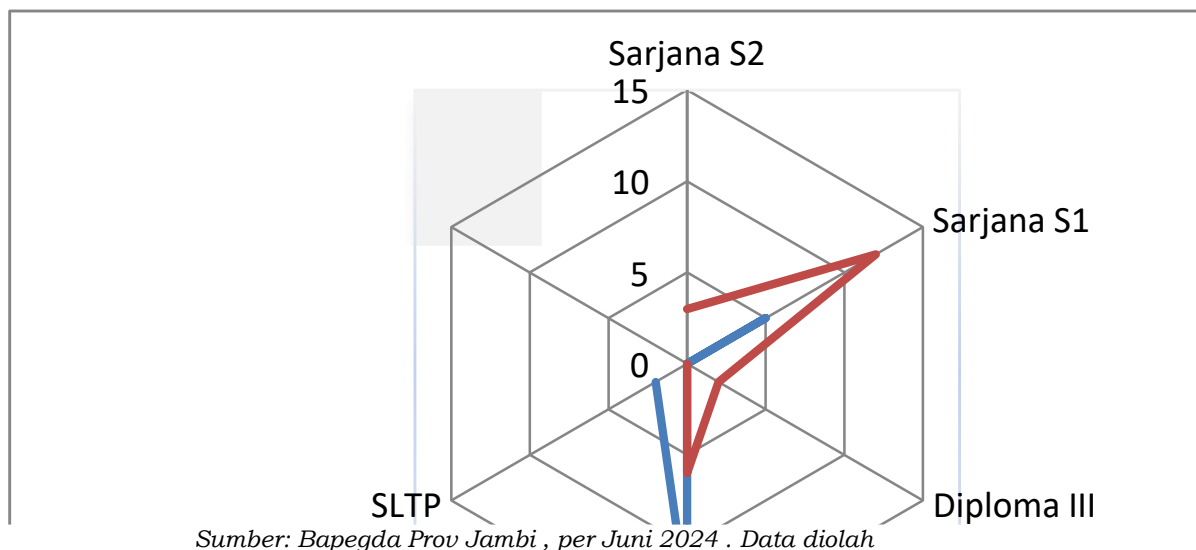
No.	Kualifikasi Pendidikan	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pasca sarjana (S2)	-	3	3
2.	Sarjana (S1)	5	12	17
3.	Sarjana Muda (DIII)	-	2	2
4.	SLTA	13	6	19
5.	SLTP	2	-	2
	Jumlah	20	23	43

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025. Data diolah

Tabel 2.4. menunjukkan bahwa berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan Pegawai PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, bila dilihat dari pendidikan SLTA ke atas, pegawai Laki- laki yang berpendidikan tamatan SLTP sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA untuk pegawai laki- laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Sarjana Muda (DIII) untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang. Sarjana (S1) pegawai laki – laki sebanyak 5 orang, perempuan sebanyak 12 orang, untuk tamatan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang pegawai perempuan.

Selanjutnya profil kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
 Profil Kepegawaian PNS
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Selanjutnya berdasarkan Tingkat Usia, jumlah PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terdiri dari: 43 orang. Usia 36-40 tahun, 4 orang; usia 41-45 tahun, 13 orang; usia 46-50 tahun, 10 orang; usia 51-55 tahun, 9 orang; dan usia 56-60 tahun, 7 orang seperti ditunjukkan Tabel 2.5.

Tabel 2.5
 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin
 Kondisi April 2025

No.	Tingkat Usia (tahun)	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	31 - 35	-		
2	36 - 40	-	4	4
3	41 - 45	8	5	13
4	46 - 50	5	4	9
5	51 - 55	4	5	9
6	56 - 60	3	4	7
Total		20	23	43

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per Juni 2024. Data diolah

Untuk jelasnya nama-nama Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada posisi April 2025 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini adalah daftar Aparatur Sipil Negara Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tanggal 1 April 2025. Sedangkan 44 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) terdiri dari 33 orang berjenis kelamin Laki-laki dan sisanya sebanyak 11 orang berjenis kelamin Perempuan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.

**Daftar Nama Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi**

No	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan	TMT SK Pertama	Masa Kerja	
		L	P					Tahun	Bulan
1	ANDRI WIDAYANTO	✓		19-03-1986	Administrasi Umum	SMK (Teknik Elektro)	01-04-2005	19	3
2	RITNO	✓		21-07-1977	Petugas Pelayanan dan HAL	SMP	21-07-2006	17	11
3	FERIANTO, ST	✓		15-02-1980	Administrasi Umum	S1 (Teknik Mesin)	15-06-2007	17	1
4	EPENDI	✓		23-10-1967	Petugas Keamanan	SMA	25-03-2008	16	3
5	SUYADI	✓		07-05-1969	Teknisi Listrik dan AC	SMA(IPS)	25-03-2008	16	3
6	JOKO SULISTYONO	✓		14-04-1985	Teknisi Listrik dan AC	SMA (IPA)	01-06-2008	16	1
7	AGUNG PRATAMA	✓		24-05-1990	Administrasi Umum	SMA (IPS)	01-06-2008	16	1
8	YULY		✓	15-02-1976	Pengelolaan Pelayanan Mess	SMP	01-04-2010	14	3
9	DEDI SETIAWAN	✓		04-06-1983	Pengelolaan Pelayanan Mess	SMA (IPS)	01-04-2010	14	3
11	SUPRIYANTO	✓		29-12-1979	Petugas Pelayanan Bandara	D1(Manajemen Informatika)	18-01-2011	13	5
12	MARHADI, S.Pd.I	✓		16-09-1982	Petugas Pelayanan Bandara	S1 (Pendidikan Agama Islam)	20-01-2012	12	5
13	AMRULLAH, ST	✓		04-08-1977	Administrasi Umum	S1 (Teknik Elektro)	02-01-2013	11	6
14	HAROMAINI	✓		24-11-1984	Pengelolaan Pelayanan Mess	SMA (IPS)	01-04-2014	10	3
15	ELINA DARWANI, S.Sos		✓	23-03-1981	Administrasi Umum	S1 (Ilmu Sosial)	01-10-2014	9	9

16	WIDHI SASONGKO JATI	✓		26-07-1986	Administrasi Umum	SMA(IPS)	02-04-2018	6	3
17	AINAYAH KHAERUNNISAI		✓	28-08-1998	Operator Komputer	SMA (IPS)	02-04-2018	6	3
18	WAGIMIN	✓		27-01-1988	Teknisi Listrik dan AC	SMA	02-05-2018	6	2
19	PUTRI THARA BANOWATI, S.M		✓	13-08-2000	Administrasi Umum	S1 (Manajemen)	03-07-2018	6	0
20	MUHAMMAD BAGAS RIGIASTA	✓		25-12-1999	Administrasi Umum	SMA (IPA)	01-08-2018	5	11
21	HARRY SETYAWAN, SH	✓		24-04-1995	Petugas Layanan Hubungan Antar Lembaga	S1 (Ilmu Hukum)	01-10-2018	5	9
22	FAISOL UDAYA	✓		06-09-1975	Pengelola Surat	SMA (IPS)	10-06-2019	5	1
23	AJAT SUDRAJAT	✓		16-06-1989	Administrasi Umum	SMA	14-06-2019	5	1
24	SYAMSUDIN INDRANEGARA	✓		16-06-1981	Pengelola Surat	SMA	03-10-2019	4	9
25	MUHAMMAD YANTO	✓		02-08-1995	Petugas Pelayanan Bandara	SMA	01-10-2019	4	9
26	FERDIAN SUBAGJA	✓		10-11-1991	Administrasi Umum	SMA	01-07-2020	4	0
27	AZANI	✓		12-05-1973	Administrasi Umum	SMA	01-10-2020	3	9
28	ARPITAYANI, SE		✓	12-04-1992	Operator Komputer Pengelolaa Wisma	S1 (Ekonomi Pembangunan)	01-10-2020	3	9
29	MUHAMMAD IHSAN SARHAN, A.Md	✓		14-07-2001	Operator Komputer	D3 (Manajemen Informatika)	01-10-2020	3	9
30	SOPAN SOPIAN	✓		07-09-1986	Petugas Keamanan	SD	1-11-2020	3	8
31	RUDI HARTONO	✓		10-08-1978	Teknisi Listrik dan AC	SMA	03-05-2021	3	2
32	DEIT TANAMAL	✓		01-01-1979	Petugas Layanan Hubungan Antar Lembaga	SMA	01-05-2021	3	2
33	IDA FITRIDHA SYARI, A.Md		✓	26-10-1985	Administrasi Umum	D3 (Manajemen Informatika)	01-07-2021	3	0
34	RIZKA RESTINA, S. Ikom		✓	13-07-1987	Operator Komputer Pengelolaa Wisma	S1 (Ilmu Komunikasi)	02-01-2022	2	6

35	RA ELVIN RISKI HAMIJAYA, SE		✓	08-01-1994	Pengelolaan Surat	S1 (Ekonomi Manajemen)	02-01-2022	2	6
36	RAESARRAH S, SE		✓	08-01-1991	Administrasi Umum	S1 (Akuntansi)	03-01-2022	2	6
37	MAHESA RAJA RABBANI	✓		10-08-2003	Operator Komputer Pengelolaa Wisma	SMK (Multimedia)	14-01-2022	2	6
38	YOGI BISMANTORO	✓		08-11-1987	Petugas Pelayanan Bandara	D1 (Perhotelan)	02-06-2022	2	5
39	FERI SETIAWAN	✓		21-01-2000	Operator Komputer Pengelolaa Wisma	SMA	23-09-2023	1	9
40	MAHARANI KAMILIA		✓	22-07-2004	Operator Komputer	SMA	23-09-2022	1	9
41	AMRI SETIAWAN, S.Psi	✓		04-05-1994	Operator Komputer	S1 (Psikologi)	01-01-2023	1	6
42	KRISDA MONIKA, SE		✓	09-07-1999	Operator Komputer	S1 (Hukum Pidana Islam)	02-01-2023	1	6
43	NANA MUKYANA	✓		11-08-1975	Petugas Layanan Hubungan Antar Lembaga	SMA	01-03-2023	1	4

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per april 2025. Data diolah

Tabel 2.6. menunjukkan bahwa berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi terdiri dari : tamatan SD sebanyak 1 orang, tamatan SLTP sebanyak 2 orang, tamatan SLTA sebanyak 23 orang, tamatan Sarjana Muda (DI/DIII) sebanyak 4 orang, dan tamatan Sarjana (S1) sebanyak 12 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Kualifikasi Pendidikan	Pegawai Tidak tetap (PTT)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sarjana (S1)	5	6	11
2.	Sarjana Muda (DI /DIII)	3	1	4
3.	SLTA	22	2	24
4.	SLTP	3	1	4
5.	SD	1	-	1
	Jumlah	34	10	44

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025. Data diolah

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi telah tersedia peralatan pendukung kerja yang berpengaruh dan mendukung operasional organisasi yang meliputi ruang kerja, ruang rapat, meubelair, laptop ataupun perangkat komputer lengkap (CPU, Monitor, Printer, Keyboard, UPS), alat komunikasi (Telepon, Faksimili, Jaringan Internet dan TV Kabel) perangkat elektronik dan sarana transportasi baik berupa kendaraan dinas Pejabat (mobil dan sepeda motor) maupun kendaraan dinas operasional pelayanan lainnya.

Kondisi sarana prasarana di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sejauh ini telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana saat ini yang ada dan tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

Tabel 2.8.

Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

No	Jenis/Merk	Jumlah	Kondisi
A	KENDARAN RODA EMPAT	19	Baik
1	Toyota Fortuner	3	Baik
2	Toyota Avanza	2	Kurang Baik
3	Isuzu Panther	1	Kurang Baik
4	Honda CR-V	1	Kurang Baik
5	Honda City	1	Kurang Baik
6	Mitsubshi L300	1	Kurang Baik
7	Isuzu ELF	1	Kurang Baik
8	Toyota HIACE	3	Baik
9	Toyota HIACE	1	Kurang Baik
10	Toyota Kijang Innova	1	Baik
11	Toyota Kijang Innova	1	Kurang Baik
	Toyota Alphard	1	Baik
B	Honda HR-V	2	Baik
1			
2	KENDARAAN RODA DUA	10	Baik
3	Honda Supra X 125 CW	4	Baik
4	Honda NF125 CRX	3	Baik
	Honda NFI 125 CRX	1	Hilang
	Suzuki Thunder 125	2	Rusak

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per april 2025. Data Diolah

Selain Kendaraan dinas untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ada pula peralatan dan

teknologi penunjang kegiatan Administrasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertera pada tabel 2.9.

Tabel 2.9.

Sarana dan Prasarana Peralatan Dan Teknologi Penunjang Kegiatan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Komputer PC	36	Unit	25		11
2	Laptop	17	Unit	7	-	10
3	Printer	31	Unit	20	-	11
4	Faximili	1	Unit	-	-	1
5	Meja Rapat	23	Buah	23	-	-
6	Meja Kerja	28	Buah	28	-	-
7	Meja Nakas	167	Buah	167		
8	Kursi rapat	82	Buah	67		15
9	Kursi Kerja	31	Buah	28	-	3
10	Kursi Futura	245	Buah	233		12
11	Lemari Arsip	6	Buah	6	-	-
12	Lemari Kayu	41	Buah	41		
13	Lemari Kaca	14	Buah	14		
14	Filling Kabinet	15	Buah	12	3	-
15	Brankas	4	Buah	4	-	-
16	AC Standing	4	Unit	4	-	-
17	AC Caseete	8	Unit	4	-	4
18	AC Split	135	Unit	79	-	56
19	TV	94	Unit	54	-	40
20	Mesin Cuci	9	Unit	5	-	4
21	Kulkas	35	Unit	32	-	3
22	Kompore Gas	4	Unit	3		1

23	Kitchen Set	18	Buah	15	-	3
24	Dispenser	10	Buah	10	-	-
25	Pompa Air	14	Buah	9		5
26	Telepon	59	Unit	57	-	2
27	Mesin Foto Copy	2	Unit	2	-	-
28	Sofa	48	Set	40	6	3
29	Electric Generating Set	2	Unit	1	1	-

Sumber: Bapegdaprov Jambi, per april 2025, Data Diolah.

Total aset yang dikelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 senilai Rp.45.332.434.045,88 (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat juta empat puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen), diluar nilai Tanah dan Aset Lainnya, dengan kondisi BAIK. Jelasnya rincian aset ini tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.

Daftar Aset Badan

Penghubung Daerah Provinsi Jambi Per Desember 2024

No	Jenis Peralatan	Nilai (Rp)	Keterangan / Kondisi
1	Tanah	-	Tercatat di Biro Umum
2	Peralatan dan Mesin	15.593.523.221,70	Baik
3	Gedung dan Bangunan	59.116.986.664,00	Baik
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	184.410.000,00	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	384.185.292,00	Baik
6	Akumulasi penyusutan	(30.154.249.816,66)	
7	Aset Lainnya	2.222.410.803,35	
8	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	(2.222.410.803,35)	
	Total	45.332.434.045,88	

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per Desember 2024. Data Diolah

Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengacu pada sasaran sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari Nilai IKM; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Dari Mess Jambi dan Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Jambi TMII.

Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai Tahun 2029 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat Nya kualitas layanan Penghubung	1. Nilai IKM	80	80,5	84	84	84	21,6	27,39	75,97	85,53	83,72	27	34,02	90,44	99,4	99,67
		2. Nilai AKIP	60,05	60,10	60,10	69	76	97,88	86,14	86,14	75,05	70,40	163	143,33	143,33	108,77	92,63
2	Meningkatn ya pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pendapatan retribusi Daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakartan	Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah dari Mess Jambi (Rp 000)	1,5	420.000	1.357.350	1.319.800	1.761.419	0,58	267.400	723.550	904.800	1.328.900	38,87	63,67	53,31	68,56	74,44
		Jumlah Kunjungan Wisata ke Anjungan Jambi TMII	1	1	12	7210	8652	0,05	12,21	15	16467	15085	5	1,2	125	258,39	174,35

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025. Data Diolah



Jakarta, April 2025

KEPALA BADAN,

Drs. AMRULSYAH

NIP. 19700107 199101 1 001

Capaian realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai 2024 dan ratio pertumbuhan berfruktusasi berdasarkan anggaran APBD. Untuk tujuan dan sasaran dari Badan Penghubung Daerah yaitu meningkatnya seni budaya, promosi dan informasi dengan indikator adalah jumlah kunjungan dari tahun 2021 sampai 2024 dengan rata rata ratio pertumbuhan sebesar 112,79%.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang berada di Jakarta Pusat, berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi Usaha Jasa Umum yang membantu masyarakat Jambi sebagai tempat menginap selama berada di Jakarta, ini sangat membantu baik masyarakat maupun PNS yang menjalankan aktifitasnya di Jakarta. Jumlah kamar yang tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebanyak 41 kamar yang disewakan sebanyak 38 kamar terdiri dari 4 kamar VIP, 34 kamar Standar (kondisi layak sewa) dan 2 kamar VVIP tidak dijual/sewa khusus diperuntukkan untuk Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. 1 kamar VIP untuk Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Perkembangan Pendapatan Daerah Jambi dari Retribusi Jasa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta dari Tahun 2020 s/d 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebelumnya.

Pendapatan retribusi daerah yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasar kode rekening SIMDA Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi diperoleh dari :

1. Retribusi Pemakaian Ruangan terdiri dari :
 - 1.1 Sewa Ruang Barak di Anjungan Jambi TMII;
 - 1.2 Sewa Aula Bawah Rumah Adat Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit;
 - 1.3 Sewa Aula Balai Mufakat Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit;
 - 1.4 Sewa Kamar di Anjungan Jambi TMII sebanyak 5 (lima) kamar;

- 1.5 Sewa Kantin Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit.
2. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggerahan / Villa, (Jasa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Cikini) terdiri dari sewa 5 (lima) kamar VIP dan 34 (tiga puluh empat) kamar standar.

Tabel 2.12 memperlihatkan retribusi pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 sampai Tahun 2024 terutama dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mendekati target dan selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 45 %, belum tercapai target ini karena yang jumlah tamu yang menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Anjungan Jambi TMII masih belum maksimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

1. Jumlah PNS yang menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi masih rendah hal ini karena beberapa kegiatan yang dilakukan mendapat fasilitasi akomodasi.
2. Kondisi kamar dan ruang di Anjungan Jambi TMII yang kurang layak dijual karena mengalami kerusakan dari prasana yang ada.
3. Belum optimalnya menjalankan regulasi tentang menginap di Mess Jambi di Jakarta.

Dan khususnya pada tahun 2024 rasio capaian retribusi pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berada di angka yang paling tinggi mencapai angka sebesar Rp. 74,44%. Capaian ini merupakan bentuk dari kinerja seluruh peran aktif ASN dan PTT Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan semua regulasi yang berkaitan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk indikator kunjungan wisata Anjungan Jambi TMII dari tahun 2020 – 2024 pada umumnya meningkat dan mencapai target. Tetapi pada tahun 2021, jumlah tamu yang berkunjung menurun drastis dengan rasio sebesar 1% hal ini

disebabkan karena terjadinya Pandemi *Covid-19* di Indonesia dan Dunia.

Disamping itu rata-rata setahun kegiatan promosi seni dan budaya daerah Jambi yang dilaksanakan di Anjungan Jambi TMII sebanyak 5 (lima) kali. Kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara dengan rata rata capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 sebesar 112,78%. Adapun Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12

Anggaran Dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2025

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.360	14.569	14.914	20.014	14.157	11.495	12.403	14.589	19.343	13.447	93	85,13	97,82	96,64	94,98	15,20	14,26
Program Pelayanan Penghubung	258	526	744	1.329	491	257	516	734	1.323	476	99	98,14	98,67	99,54	97,02	66,96	N/A

Sumber: Bapegda Prov Jambi, April 2025. Data Diolah

Capaian Anggaran APBD Provinsi Jambi yang tersedia untuk Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dari Tahun 2020 – 2024 yang terdiri dari 2 program penunjang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 15,30% dan Program Pelayanan Penghubung dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 66,96%, namun terdapat penurunan anggaran di tahun 2021 dikarenakan *refocusing covid-19* dan di tahun 2024 ini karena alokasi anggaran untuk persiapan pemilihan kepada daerah(Pilkada), sehingga anggaran yang di anggarkan mengalami *refocusing*.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya tamu Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, sangat ditentukan oleh standard pelayanan dan kemampuan manajemen organisasi untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pemilihan strategi dan kebijakan.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- ❖ Domisili Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang berada di Ibukota DKI Jakarta.
- ❖ Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
- ❖ Adanya kerjasama antar Lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga non pemerintah.

- ❖ Sistem dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mulai tertata dengan baik.
 - ❖ Memiliki budaya daerah yang beragam yang dapat menarik minat masyarakat.
 - ❖ Terjalannya hubungan yang harmonis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- b. Faktor Ancaman (*Threat*)
- ❖ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang prima.
 - ❖ Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor dan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang memadai.
 - ❖ Tuntutan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat.
 - ❖ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi layanan administrasi umum dan keuangan.
 - ❖ Kualitas SDM yang belum memadai.
 - ❖ Banyaknya hotel dan penginapan sejenis lainnya disekitar Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Jambi

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2025-2029 perlu ditingkatkan. Evaluasi ke depan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, permasalahan pokok yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah :

1. Rendahnya capaian target retribusi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dengan masalah sebagai berikut :
 - 1)Belum optimalnya pelayanan publik, disebabkan oleh :

- a. Sarana dan Prasarana Mess/Kantor yang masih belum memadai,
 - b. Kurangnya Pelatihan / BIMTEK,
 - c. Tidak mengikuti perkembangan IPTEK.
- 2) Banyaknya hotel dan penginapan sejenis di sekitar Mess Jambi, disebabkan oleh kurangnya promosi tentang keberadaan Mess Jambi.
- 3) Kurangnya minat masyarakat dan PNS untuk menginap di Mess Jambi, disebabkan oleh:
- a. Belum maksimalnya menjalankan regulasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mengatur PNS untuk menginap di Mess Jambi seperti Perda, Pergub dan ingub.
 - b. Aplikasi pemesanan mess Jambi yang belum optimal dalam pelaksanaan.
- 4) Kegiatan Promosi Budaya Daerah yang masih belum optimal disebabkan oleh:
- a. Perubahan Pengelolaan Anjungan Taman Mini Indonesia yang semula di kelola oleh yayasan Harapan Kita ke Pemerintah sehingga membuat beberapa kegiatan promosi disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
 - b. Masih kurangnya pelaksanaan Kegiatan Pagelaran Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan Provinsi Jambi.
 - c. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Seni Budaya.
2. Belum optimalnya tugas dan fungsi Badan Penghubung, dengan masalah sebagai berikut:
- Masih rendahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, disebabkan oleh faktor belum tersosialisasikanya tugas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dapat dilihat dari masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama ini . Untuk jelasnya masalah pokok, masalah dan akar masalah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 2.13
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya capaian target retribusi Badan Penghubung Daerah Provinsi Daerah	1. Belum optimalnya pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana Mess / Kantor yang masih belum memadai • Kurangnya Pelatihan / BIMTEK • Belum optimal dalam perkembangan IPTEK • Kurang memahami dan menguasai Tupoksi masing-masing ASN
		2. Banyaknya hotel dan penginapan sejenis di sekitar Mess Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya promosi tentang keberadaan Mess Jambi.
		3. Kurangnya minat masyarakat dan PNS untuk menginap di Mess Jambi	<p>a. Belum maksimalnya menjalankan regulasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mengatur PNS untuk menginap di Mess Jambi seperti Perda, Pergub dan ingub.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letak gerografis Mess Jambi yang kurang strategis

		4. Masih kurangnya Kegiatan Promosi Budaya Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan pagelaran seni budaya dan pameran produk unggulan Provinsi Jambi. • Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan seni budaya.
2.	Belum optimalnya tugas dan fungsi badan Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersosialisasikannya tugas dan fungsi badan Penghubung kepada Kabupaten Kota.

Sumber: Bapegda Prov Jambi, April 2025. Data Diolah.

2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

**“ Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**

- Jambi MANTAP** : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan, aspek sosial budaya, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.
- Berdaya saing** : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Berkelanjutan** : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5

(lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

2.6.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis.** Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, melibatkan seluasnya-luasnya peran masyarakat dalam proses pembangunan serta adaptif dengan perubahan zaman. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
2. **Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan Daerah.** Daya saing daerah merupakan refleksi dari kemajuan dan produktivitas daerah tersebut. Daya saing daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas pada tiga lini, yaitu produktivitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong oleh efisien dan produktivitas yang didorong oleh inovasi. Sektor-sektor dalam bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata adalah sektor unggulan Provinsi Jambi yang dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan dukungan infrastruktur yang handal, akses permodalan dan pasar serta ekosistem inovasi yang baik. Ukuran yang digunakan untuk melihat peningkatan daya saing daerah ini adalah Indeks Daya Saing Daerah.

3. **Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara social.**
4. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.** Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Modal Manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tujuan ini tercapai.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital Birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital.** Menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital, serta jujur dan bertanggung jawab dengan hasil kinerja yang terukur. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan indeks integritas nasional Provinsi Jambi, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan indeks pelayanan publik.
2. **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.** Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bergantung pada peranan pemerintah dan masyarakat. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk

mendapatkan informasi pembangunan serta menyampaikan pendapat tanpa intervensi akan mengurangi gesekan-gesekan yang akan mengganggu proses pembangunan daerah. Untuk itu Indeks Aspek Kebebasan pada Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Keterbukaan Informasi menjadi indikator yang digunakan untuk melihat peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Jambi.

3. **Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Daerah**

Penyediaan Infrastruktur yang handal pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD ini. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio konektivitas, persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, akses terhadap air minum layak, konsumsi listrik per kapita dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.

4. **Meningkatnya stabilitas ekonomi makro.**

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi makro adalah dengan mengendalikan inflasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, swasembada pangan, serta meningkatkan investasi di daerah. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah inflasi, rasio kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, indeks ketahanan pangan, ICOR dan PDRB perkapita.

5. **Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah**

Skala ekonomi masyarakat dan daerah didorong dengan

meningkatkan nilai tambah lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong industrialisasi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Tidak hanya mendorong sektor sekunder, sektor pariwisata dan sektor tersier lainnya juga akan didorong agar mengalami peningkatan nilai tambah. Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang besar terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu, UMKM yang ada di Provinsi Jambi akan didorong untuk lebih produktif melalui pemberian akses permodalan yang lebih luas. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah tingkat inklusi keuangan provinsi, persentase nilai impor terhadap PDRB ADHB, rasio PDRB penyediaan makan dan minum, distribusi PDRB sektor tersier, rasio PDRB industri pengolahan, Distribusi PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

6. Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi

Ekosistem inovasi dibutuhkan untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi di Provinsi Jambi. Para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, korporasi, komunitas, institusi pendidikan dan lain-lain akan berkolaborasi mewujudkannya. Melalui jaringan informasi yang terbentuk dalam ekosistem inovasi, masing-masing pemangku kepentingan dapat berbagi informasi dan sumber daya yang dapat membantu satu sama lain mengatasi permasalahan yang ada.

Keberhasilan ekosistem inovasi di Provinsi Jambi akan ditandai oleh indikator meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya indeks inovasi daerah dan pengeluaran IPTEK dan Inovasi (Persen APBD).

7. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**

Pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu pada tujuan sila kelima Pancasila dan Pasal 27 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi adalah penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatnya indeks produktivitas tenaga kerja.

8. **Meningkatnya kualitas lingkungan**

Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

9. **Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat**

Pesisir dan sumber daya kelautan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Namun sumber daya laut yang banyak belum bisa menjamin penduduk di wilayah pesisir dapat hidup dengan layak karena pemanfaatan sumber daya yang kurang baik.

Keberhasilan sasaran meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dilihat dari indikator peran sektor perikanan dalam PDRB, rata-rata konsumsi kalori ikan perkapita perhari dan persentase penduduk miskin ekstrim di wilayah pesisir.

10. **Meningkatnya kualitas hidup masyarakat** Kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup dan prevalensi stunting menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

11. **Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender** Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah. Selain itu, kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat perekat bangsa. Oleh karena itu sumber daya manusia yang berkebudayaan menjadi salah satu sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD ini, yang ditandai dengan indeks pembangunan kebudayaan. Sementara sebagai bentuk pengarusutamaan gender, optimalisasi peran perempuan perlu terus didorong. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi

Jambi belum optimal dan hanya pada bidang-bidang tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Ketimpangan Gender.

2.7 Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

2.7.1 Pengertian Renstra

Renstra (Rencana Strategis) ialah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang akandicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan peluang, dan tantangan yang ada.

Oleh karena Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di bawah Pemerintah Provinsi Jambi, maka Visi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yakni ;

“Mewujudkan Jambi *MANTAP* Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

Sedangkan Misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah Misi kesatu dari 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

“ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelolapemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi”

2.7.2 Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan adalah serangkaian asumsi mengenaikondisi yang perlu diciptakan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program. Faktor penentu keberhasilan disini antara lain :

1. Tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai komitmen tinggi dan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta; serta kebijakan otonomi daerah yang didukung pendanaan yang cukup memadai guna pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi menjadi faktor penentu keberhasilan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Dukungan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 akan mampu menjawab atau mengatasi tantangan kondisi eksternal dimana pengawasan dari berbagai elemen masyarakat semakin tinggi dan pola pikir yang semakin kritis.
3. Adanya peluang otonomi daerah dan tata kelola birokrasi dan hubungan kerjasama antar instansi yang semakin baik akan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada serta tantangan-tantangan yang muncul dalam mencapai visi dan misi organisasi.

2.8 Penentuan Isu Strategis

2.8.1 Penentuan Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Berangkat dari isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Isu Strategis Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi lima tahun ke depan adalah :

1. Pendapatan Mess Jambi yang belum memenuhi target.
2. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah.
3. Belum optimalnya tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terutama dalam koordinasi dengan Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Berangkat dari Misi 1 (satu) dari 3 (tiga) Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, yaitu : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”, maka tujuan pembangunan daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diambil dari Tujuan 1 (satu) dari 3 (tiga) Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis” dengan demikian tujuan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 adalah :

Terwujudnya capaian kinerja layanan penghubung.

3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah sasaran 1 (satu) dari 11 (sebelas) sasaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 –2029, yaitu :

Terwujudnya Lembaga yang Melayani dan Berbasis Digital.

Dengan demikian sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah: **Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung.** Dari sasaran tersebut maka diturunkan dalam indikator sasaran yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat adalah nilai indeks dari hasil survey terhadap kepuasan dari responden yang menginap di mess Jambi sesuai dengan Permenpan nomor 14 tahun 2017.

2. Persentase Pelayanan Penghubung yang optimal

Pengukuran persentase ini dilakukan dengan indikator jumlah kunjungan ke anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia, Jumlah pelayanan terhadap pimpinan yang difasilitasi dan dilakukan ke Kementerian dan Lembaga serta jumlah responden yang menginap Mess Jambi.

3. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan kategori reformasi dengan yang kategorikan dalam huruf berupa : AA, A, BB, B, CC, C dan D

4. Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi

Persentase peningkatan realisasi penerimaan retribusi adalah target realisasi tahun berjalan dikurangi target realisasi tahun sebelumnya dibagi target realisasi tahun sebelumnya.

5. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah

Hasil monev merupakan hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Terwujudnya Lembaga yang melayani dan berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik (IPP)			8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	
			Meningkatnya kualitas layanan penghubung	IKM Layanan Penghubung	83,7	83,8	84	84,05	84,1	84,15	84,2	
				Persentase Pelayanan Penghubung yang optimal	66,7	71,77	76,7	80,76,7	82,580	84,2,5	86,84	86,5
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,4	70,7	70,75	70,8	70,85	70,9	70,95	
				Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi	33,5	14,4	14,8	15	15,3	15,5	15,8	
				Hasil monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	8	70,01	71	72	73	74	75	

Sumber :Bapegdaprov. Jambi September 2025. Data Diolah.

3.3. Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Sebagai langkah lanjut dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 –2026 maka diperlukan suatu strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun (2025-2029). Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program yang mendukung terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029.

Adapun Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, sebanyak 14 (empat belas) Strategi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas ASN melalui Pelatihan Seminar dan Workshop
2. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif
3. Meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat
4. Meningkatkan ASN yang memiliki jiwa inisiatif dan solusi
5. Menciptakan profesionalisme bertanggungjawab dan dapat diandalkan
6. Meningkatkan fasilitas menunjang layanan pimpinan
7. Membangun jaringan komunikasi hubungan yang baik antar lembaga
8. Membangun kerjasama kementrian/lembaga/swasta lainnya dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan event-event Promosi Budaya dan kegiatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek
9. Mengadakan Kegiatan Seni Budaya yang menarik dan beragam melalui festival Seni Budaya, Pertunjukan Seni budaya, Pameran

10. Tersusunnya Regulasi tentang Pengelolaan Mess
11. Membangun penguatan system dan prosedur
12. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku Jabatan dan lintas sector
13. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi

3.4. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Untuk melaksanakan kelima Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, maka ada 6 (enam) Arah Kebijakan yang diambil Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Melakukan survey jejak pendapat pelayanan pimpinan.
2. Meningkatkan kompetensi ASN pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
3. Melakukan koordinasi kerjasama hubungan antar Kementrian /lembaga/swasta lainnya dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan event-event Promosi Budaya dan kegiatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek
4. Mengadakan event-event Promosi Seni Budaya dan Produk Unggulan
5. Meningkatkan kualitas penunjang dalam penyelenggaraan Promosi Seni Budaya
6. Melakukan survei jejak pendapat pelayanan publik
7. Meningkatkan kompetensi SDM
8. Membangun Inovasi layanan berbasis Teknologi pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
9. Tersusunnya regulasi tentang tata kelola menginap di Mess Jambi
10. Memanfaatkan Teknologi untuk Fasilitasi layanan
11. Meningkatkan pemeliharaan Gedung dan Jumlah sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

12. Mempedomani peraturan tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

13. Pemanfaatan Teknologi

14. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Untuk jelasnya lima Strategi dan tujuh Arah Kebijakan pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.
Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2025-2029

VISI	“Terwujudnya Jambi <i>MANTAP</i> (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) dibawah Ridho Allah SWT”		
MISI I	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung <i>e-government</i> yang terintegrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya capaian kinerja layanan penghubung	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan PAD atas pemanfaatan sarana dan pra sarana	1. Meningkatnya kualitas ASN melalui Pelatihan Seminar dan Workshop	1. Melakukan survey jajak pendapat pelayanan pimpinan 2. Meningkatkan kompetensi ASN pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
		2. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif	
3. Meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat			
4. Meningkatkan ASN yang memiliki jiwa inisiatif dan solusi			
5. Menciptakan profesionalisme bertanggungjawab dan dapat diandalkan			
6. Meningkatkan fasilitas menunjang layanan pimpinan			
7. Membangun jaringan komunikasi hubungan yang baik antar lembaga			
		8. Membangun kerjasama kementerian/lembaga/swasta lainnya dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan	3. Melakukan koordinasi kerjasama hubungan antar Kementerian /lembaga/swasta

		<p>event-event Promosi Budaya dan kegiatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek</p> <p>9. Mengadakan Kegiatan Seni Budaya yang menarik dan beragam melalui festival Seni Budaya, Pertunjukan Seni budaya, Pameran</p>	<p>lainnya dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan event-event Promosi Budaya dan kegiatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek</p> <p>4. Mengadakan event-event Promosi Seni Budaya dan Produk Unggulan</p> <p>5. Meningkatkan kualitas penunjang dalam penyelenggaraan Promosi Seni Budaya</p>
		<p>10. Tersusunnya Regulasi tentang Pengelolaan Mess</p>	<p>6. Melakukan survei jajak pendapat pelayanan public</p> <p>7. Meningkatkan kompetensi SDM</p> <p>8. Membangun Inovasi layanan berbasis Teknologi pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi</p> <p>9. Tersusunnya regulasi tentang tata kelola menginap di Mess Jambi</p> <p>10. Memanfaatkan Teknologi untuk Fasilitasi layanan</p> <p>11. Meningkatkan pemeliharaan Gedung dan Jumlah sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi</p>
		<p>11. Membangun penguatan system dan prosedur</p> <p>12. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku Jabtan dan lintas sector</p> <p>13. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi</p>	<p>12. Mempelajari peraturan tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>13. Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>14. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi</p>

Sumber : Bapegdaprov.Jambi April 2025.Data Diolah

Strategi dan arah kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan

sebagaimana tabel tersebut dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, yang pada tahap selanjutnya dijabarkan kembali dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilakukan secara bertahap per tahun selama lima tahun.

Selaras dengan strategi dan kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, maka Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebanyak 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

Kegiatan /Sub Kegiatan:

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Kegiatan/Sub Kegiatan:

2.1. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

2.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat

2.1.2. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

2.1.3. Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

2.1.4. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

2.1.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

4.2. Pendanaan

Pendanaan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi bersumber dari APBD Provinsi Jambi. Untuk jelasnya dana yang diperlukan per masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)												Unit Kerja Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targe t	Rp jt	targe t	Rp jt	targe t	Rp jt	targe t	Rp jt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Nilai AKIP 2.Persentase Peningkatan Target Penerimaan Retribusi 3.Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	13.186		17.653		21.930		24.938		28.396		32.374		114.196	Badan Penghubung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-		-		22.000		25.300		29.095		33.459		109.854	Badan Penghubung

	Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	10 Laporan	11.000	10 Laporan	12.650	10 Laporan	14.547	10 Laporan	16.729	50 Laporan	54.927	Badan Penghubung
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	12 Laporan	11.000	12 Laporan	12.650	12 Laporan	14.547	12 Laporan	16.729	60 Laporan	54.927	Badan Penghubung
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang difasilitasi	7.151		7.475		8.483		9.756		11.220		12.903		49.839	Badan Penghubung
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.725	47 Orang	7.102	50 Orang	8.018	60 Orang	9.221	70 Orang	10.604	80 Orang	12.194	307 Orang	47.141	Badan Penghubung
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425.280	12 Dokumen	372.628	12 Dokumen	465.728	12 Dokumen	535.587	12 Dokumen	615.925	12 Dokumen	708.314	60 Dokumen	2.698	Badan Penghubung
Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Penataan Administrasi	205.500		207.900		432.848		467.775		507.941		554.132		2.170	Badan Penghubung

	BMD														
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Periode Pembayaran Polis Asuransi Kendaraan dan Gedung	205.500	2 Kali	207.900	2 Kali	232.848	2 Kali	267.775	2 Kali	307.941	2 Kali	354.132	10 Kali	1.370	Badan Penghubung
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	2 Laporan	200.000	2 Laporan	200.000	2 Laporan	200.000	2 Laporan	200.000	10 Laporan	800.000	Badan Penghubung
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Kepegawaian	-		63.140		136.505		156.981		180.528		207.607		744.763	Badan Penghubung
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	88 Paket	63.140	100 Paket	81.065	110 Paket	93.225	120 Paket	107.209	130 Paket	123.290	431 Paket	467.930	Badan Penghubung
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	8 Orang	55.440	10 Orang	63.756	12 Orang	73.319	15 Orang	84.317	45 Orang	276.832	Badan Penghubung
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	1.705		2.475		2.832		3.257		3.745		4.307		16.618	Badan Penghubung

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28.253	13 Paket	48.762	15 Paket	54.614	17 Paket	62.806	19 Paket	72.227	21 Paket	83.061	85 Paket	321.473	Badan Penghubung
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	125.921	44 Paket	385.861	44 Paket	443.740	44 Paket	510.302	44 Paket	586.847	44 Paket	674.874	220 Paket	2.601	Badan Penghubung
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	717.292	300 Paket	492.631	400 Paket	600.130	500 Paket	690.150	600 Paket	793.673	700 Paket	912.724	2500 Paket	3.489	Badan Penghubung
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	27.252	25 Paket	48.119	25 Paket	53.893	25 Paket	61.977	25 Paket	71.274	25 Paket	81.965	125 Paket	317.229	Badan Penghubung
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	806.685	950 Laporan	1.500	1200 Laporan	1.680	1300 Laporan	1.932	1400 Laporan	2.221	1500 Laporan	2.555	6350 Laporan	9.888	Badan Penghubung
Pengadaan Barang Milik	Persentase Pengadaan	310.000		831.657		2.264		2.351		2.452		2.568		10.469	Badan Penghubung

Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi														ung
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	310.000	1 Unit	310.000	3 Unit	1.680	3 Unit	1.680	3 Unit	1.680	3 Unit	1.680	13 Unit	7.030	Badan Penghubung
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	10 Paket	88.555	10 Paket	99.181	10 Paket	114.058	10 Paket	131.167	10 Paket	150.842	50 Paket	583.805	Badan Penghubung
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	39 Unit	433.102	39 Unit	485.074	39 Unit	557.835	39 Unit	641.510	39 Unit	737.737	195 Unit	2.855	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi	2.785		3.080		3.541		4.072		4.683		5.386		16.080	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	132.100	13 Laporan	89.454	13 Laporan	102.872	13 Laporan	118.303	13 Laporan	136.048	13 Laporan	156.456	65 Laporan	467.086	Badan Penghubung

	Jasa Surat Menyurat														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.466	12 Laporan	1.564	12 Laporan	1.800	12 Laporan	2.070	12 Laporan	2.380	12 Laporan	2.737	60 Laporan	8.171	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96.431	13 Laporan	101.754	13 Laporan	113.965	13 Laporan	131.059	13 Laporan	150.718	13 Laporan	173.326	65 Laporan	520.106	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.090	30 Laporan	1.325	30 Laporan	1.524	30 Laporan	1.753	30 Laporan	2.016	30 Laporan	2.318	150 Laporan	6.921	Badan Penghubung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah terpenuhi	1.029		3.518		4.217		4.849		5.577		6.413		18.163	Badan Penghubung

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	4 Unit	179.360	4 Unit	206.264	4 Unit	237.203	4 Unit	272.784	12 Unit	622.827	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	588.960	23 Unit	1.146	26 Unit	1.332	29 Unit	1.532	32 Unit	1.762	35 Unit	2.027	110 Unit	5.775	Badan Penghubung
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	196.884	10 Unit	843.065	10 Unit	944.232	10 Unit	1.085	10 Unit	1.248	10 Unit	1.436	50 Unit	4.121	Badan Penghubung
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/n	243.242	4 Unit	1.528	4 Unit	1.760	4 Unit	2.024	4 Unit	2.328	4 Unit	2.677	20 Unit	7.643	Badan Penghubung

	Direhabilitasi														
II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Nilai IKM	499.403	-	962.859		1.306	-	1.502	-	1.727	-	1.986	-	7.485	Badan Penghubung
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1. Persentase Peningkatan Layanan Penghubung 2. Persentase layanan promosi seni budaya 3. Persentase fasilitasi pelayanan pimpinan	499.403		962.859		1.306		1.502		1.727		1.986		7.485	Badan Penghubung
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	-	-	-	5 Laporan	55.000	5 Laporan	63.250	5 Laporan	72.737	5 Laporan	83.648	20 Laporan	274.635	Badan Penghubung
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	83.238	5 Laporan	160.250	7 Laporan	179.480	9 Laporan	206.402	11 Laporan	237.363	13 Laporan	272.967	45 Laporan	1.056	Badan Penghubung
Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk	Jumlah Laporan Hasil Promosi	416.165	20 Laporan	802.609	20 Laporan	961.841	20 Laporan	1.106	20 Laporan	1.272	20 Laporan	1.462	100 Laporan	5.605	Badan Penghubung

Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan														bung
Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-	-	-	5 Kali	55.000	5 Kali	63.250	5 Kali	72.737	5 Kali	83.648	20 Kali	274.635	Badan Penghubung
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-	-	5 Laporan	55.000	5 Laporan	63.250	5 Laporan	72.737	5 Laporan	83.648	20 Laporan	274.635	Badan Penghubung
		13.685		18.616		23.236		26.440		30.124		34.361		121.682	

Sumber : Bapedaprov. Jambi . April 2025. Data Diolah.

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengacu kepada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berangkat dari Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, maka Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni indikator kondisi positif yang ingin diwujudkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Penghubung
2. Nilai SAKIP
3. Persentase Peningkatan Target Realisasi Penerimaan Retribusi

Adapun Target IKU dan Kondisi Akhir IKU pada tahun 2026 yang ingin dicapai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.2.

Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Nilai IKM	83,7	83,8	84	84,05	84,10	84,15	84,2	84,2
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan PAD atas Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	1.Nilai AKIP	70,4	70,7	70,75	70,8	70,85	70,9	70,95	70,95
		2.Persentase peningkatan Target realisasi Penerimaan Retribusi	33,5	14,4	14,8	15	15,3	15,5	15,8	15,8
		3.Hasil Monev keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	8	70,01	71	72	73	74	75	75

Sumber : Bapegdaprov. Jambi . April 2025. Data Diolah.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan penghubung	Nilai IKM	$IKM = \left(\frac{\sum \text{Nilai per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 25$ <p>Sesuai dengan hasil survey (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017)</p>	1. Biro Organisasi 2. Badan Penghubung	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan PAD atas Pemanfaatan sarana dan pra sarana	1.Nilai AKIP	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Kategori Reformasi Birokrasi;, yaitu AA (nilai > 90), A (nilai > 80), BB (nilai > 70), B (nilai > 60), CC (nilai > 50), C (nilai > 30), dan D (nilai 0-30). Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 	Inspektorat Daerah	
		2.Persentase Peningkatan Target Realisasi Penerimaan Retribusi	Target Realisasi Tahun Berjalan dikurangi Target Realisasi Tahun Sebelumnya dibagi Target Realisasi Tahun Sebelumnya dikali 100%	Badan Penghubung	
		3.Hasil monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	Hasil penilaian komisi Informasi Provinsi Jambi	Badan Penghubung	

Sumber : Bapegdaprovjambi.April 2025. Data diolah.

4.4 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.4
 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi,
 Tahun 2025–2029

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>out come</i>)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (<i>out put</i>)
5.07.01	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	1. Nilai AKIP 2. Persentase Peningkatan Target Penerimaan Retribusi 3. Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	-
5.07.01.1.01		1.1.Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.07.01.1.01.0001			1.1.1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.07.01.1.01.0007			1.1.2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.07.01.1.02		1.2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang difasilitasi
5.07.01.1.02.0001			1.2.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	JumlahOrang yangMenerima Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01.1.02.0002			1.2.2.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.07.01.1.03		1.3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase Penataan Administrasi BMD
5.07.01.1.03.0002			1.3.1.Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Periode Pembayaran Polis Asuransi Kendaraan dan Gedung
5.07.01.1.03.0006			1.3.2.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.07.01.1.05		1.4.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah			Persentase layanan administrasi Kepegawaian
5.07.01.1.05.0002			1.4.1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
5.07.01.1.05.0009			1.4.2.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
5.07.01.1.06		1.5.Administrasi Umum Perangkat daerah			Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01.1.06.0001			1.5.1.Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.06.0002			1.5.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.06.0004			1.5.3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.06.0005			1.5.4.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
5.07.01.1.06.0009			1.5.7.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.07.01.1.07		1.6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi
5.07.01.1.07.0002			1.6.1.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
5.07.01.1.07.0005			1.6.2.Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01.1.07.0006			1.6.3.Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
5.07.01.1.08		1.7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi
5.07.01.1.08.0001			1.7.1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.07.01.1.08.0002			1.7.2.Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5.07.01.1.08.0003			1.7.3.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.08.0004			1.7.4.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.09		1.8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah terpenuhi
5.07.01.1.09.0001			1.8.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01.1.09.0002			1.8.2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
5.07.01.1.09.0006			1.8.3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5.07.01.1.09.0009			1.8.4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.07.02	2.Program Pelayanan Penghubung			Nilai IKM	
5.07.02.1.01		2.1.Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			1. Persentase Peningkatan Layanan Penghubung 2. Persentase layanan promosi seni budaya 3. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pimpinan
5.07.02.1.01.0001			2.1.1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.02.1.01.0002			2.1.2.Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
5.07.02.1.01.0003			2.1.3.Peningkatan fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan
5.07.02.1.01.0004			2.1.4.Kegiatan fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5.07.02.1.01.0005			2.1.5.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Sumber: Bapegdaprov. Jambi. April 2025. Data Diolah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dibawah koordinasi Bappeda Provinsi Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) ini menguraikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang juga merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang strategis guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai tujuan organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) yang akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan ***Jambi MANTAP Tahun 2026***.

Keberhasilan pelaksanaan Ranhir (Renstra) Perubahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh komponen dalam organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, kerjasama dan koordinasi yang baik sesama Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi serta masyarakat.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini disusun, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Pemerintahan hadir untuk menjawab solusi bagi masyarakat, Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam sistem sebuah Negara, esensinya menciptakan pembangunan yang merata keberbagai aspek dan mampu mensejahterakan masyarakat. Banyak sebab musabab Kegagalan Penyelenggaraan Pemerintah, Negara dan Pembangunan yang baik karena tidak mengindahkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dibuat dengan berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagaimana diatur pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi lebih akuntabel karena sudah terpola dan terpadu.

Jakarta, September 2025

KEPALA BADAN,



Drs. AMRULSYAH

Pembina

NIP.19700107 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	16
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	40
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	41
2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
2.7. Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	53
2.8. Penentuan Isu Strategis	55

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIAJAKAN	56
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	56
3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jamb	56
3.3. Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi ..	59
3.4. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	60
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	64
4.2. Pendanaan	66
4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	76
4.4. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	78
BAB V PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029	9
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	16
Gambar 2.2 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Jabatan Tahun 2025	20
Gambar 2.3 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Golongan Tahun 2025.....	21
Gambar 2.4 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2025	23
Gambar 2.5 Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 22
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin 22
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin 24
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin 25
Tabel 2.6	Daftar Nama - nama Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 27
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin 30
Tabel 2.8	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin 31
Tabel 2.9	Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 32
Tabel 2.10	Daftar Aset Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 33

Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.....	35
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	39
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.....	58
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029	61
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	59
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	78
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, selama tahun 2025 – 2029	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma baru pemerintahan yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan prima (*Excellent Service*) dari unit-unit pemerintahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di mana salah satunya mewajibkan setiap Instansi Pemerintahan untuk menyusun Rencana Strategis.

Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi Daerah serta tujuan setiap Organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Rencana Strategis PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan 2025-2030. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka dilakukan penyelarasan terhadap kinerja dan periodisasi antara RPJMD dan RPJMN tahun 2025 - 2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029

menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Jambi yakni unsur staf yang membantu Gubernur Jambi, memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jambi yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu:

**“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**

Dengan Misi sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian

pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Rencana Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan peluang, dan tantangan yang ada, yang disusun oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.

Selanjutnya Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, akan dijabarkan kembali setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai Tahun 2029, yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

Selanjutnya Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi 2025-2029 disamping menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai Tahun 2029, juga menjadi dasar penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, menjadi acuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKj) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan daripada masyarakat, *stakeholder* yang terkait dengan pemerintahan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian bidang Pemerintahan khususnya aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, bahwa pembangunan Provinsi Jambi diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerinath Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Belanja Daerah Berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, analisis standar belanja,

- dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 35);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12).
 15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
 16. Perlu ditambahkan Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036 sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mendagri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
 17. Perda Provinsi Jambi nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas perda Provinsi Jambi nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.1.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029.
- b. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.1.2 Tujuan

Adapun Tujuan dari disusunnya Renstra ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai Tahun 2029, dan menjamin adanya konsistensi perumusan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- Sebagai dasar evaluasi penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sehingga mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.7. Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.8. Penentuan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

3.3. Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

3.4. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program Dan Kegiatan

4.2. Pendanaan

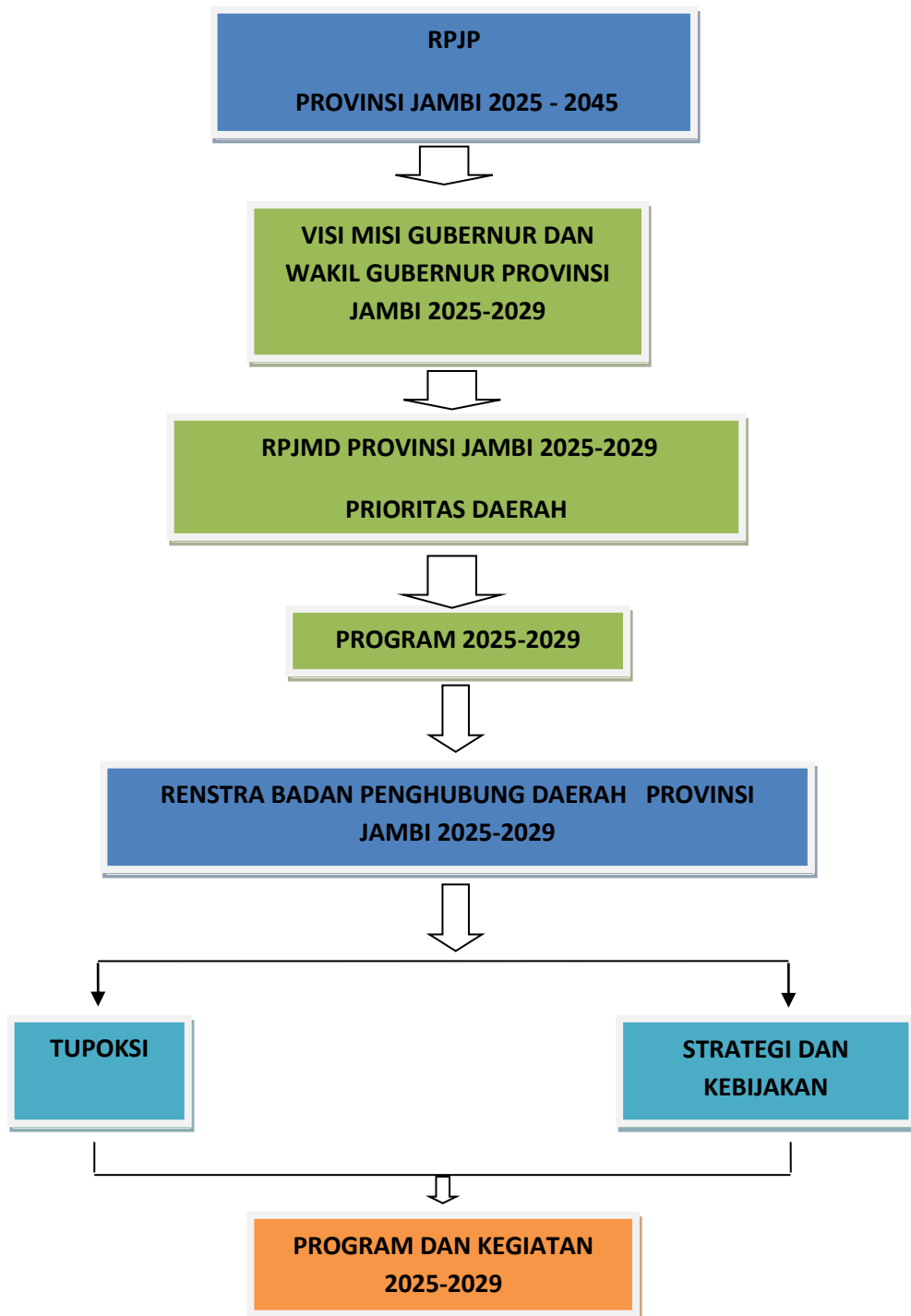
4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.4. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Gambaran kerangka pikir penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengikuti Hierarki Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada Gambar 1.1

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029



Sumber: Bapegda Prov Jambi, April 2025 data diolah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Disebutkan pada pasal 2 bahwa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penghubung Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana tersurat pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016, yaitu:

- a. Penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen dan Swasta di Jakarta.
- b. Pembinaan Masyarakat Daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi / Luar Daerah.
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data atau Informasi.
- d. Pengadaan Kegiatan Promosi, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata.
- e. Pengelolaan Anjungan Daerah Jambi di Taman Mini Indonesia Indah.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertera dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016, terdiri dari :

1. Kepala

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi bersama Sub Bagian Tata Usaha, Subbidang Pengelolaan Mess dan Aset, Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi, Informasi dan Seni Budaya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan Administrasi Tata Naskah Dinas, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Pendistribusian Surat Menyurat dan Pengadaan.
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian, Administrasi Kenaikan Pangkat, Pelatihan, Disiplin Pegawai ASN, Mutasi, Pemberhentian, Gaji Berkala, Kartu Pegawai, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pelaksanaan Evaluasi Kehadiran dan Penilaian Kinerja dalam Pemberian Tunjangan.
- d. Pengusulan Penerima Penghargaan, Cuti, Sumpah/Janji, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai ASN;
- e. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan.
- f. Pembuatan Database Pegawai Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan Urusan Administrasi Keuangan Meliputi

- Verifikasi, Pembukuan, Perbendaharaan dan Gaji.
- h. Perencanaan dan Pengelolaan Perpustakaan.
 - i. Pengkajian, Perencanaan, Penyusunan dan Pengevaluasi Program Kerja.
 - j. Pemantauan dan Pengambilan Langkah-Langkah Pelaksanaan Evaluasi, Pelaporan dan Penyiapan Bahan Evaluasi Serta Penyusunan Laporan.
 - k. Pelaksanaan dan Penyiapan Laporan dan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
 - l. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.
3. Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset
- Mempunyai tugas mengelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bidang Pengelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan dan Pengevaluasi Standar Operasional Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, Bogor dan Luar Daerah.
 - b. Penataan Dan Penginventarisir Sarana dan Prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi Jambi Di Jakarta, Bogor, Depok, dan Luar Daerah.
 - c. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengambil Langkah-langkah Pelaksanaan Pemeliharaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Aset Pemerintah Provinsi

Jambi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah.

- d. Pelaksanaan Urusan Kontrol Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kartu Inventaris Barang.
- e. Pelaksanaan Urusan Promosi Mess Jambi, Peningkatan Pelayanan Dengan Sistem Pelaporan Penerimaan Mess Jambi.
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

4. Sub Bidang Pelayanan Dan Hubungan Antar Lembaga

Mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Bidang Keprotokolan, Kehumasan, Akomodasi, Transportasi, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Provinsi, Lembaga-Lembaga Pemerintah Departemen/Non Departemen, Swasta dan Internasional serta Pembinaan Masyarakat Jambi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah yang berkaitan dengan Bidang Tugas dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan Program Kerja Kegiatan Keprotokolan, Kehumasan, Akomodasi dan Transportasi Serta Hubungan Antar Lembaga.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan, Kehumasan, Akomodasi dan Transportasi serta Hubungan Antar Lembaga.
- c. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi/Luar Daerah.
- e. Pengurusan, Penyiapan Kelengkapan Administrasi dan

Perjalanan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Sekretaris Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Pelaksanaan Koordinasi Mengenai Hubungan Kerja yang sedang dan akan dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Pemerintah (Lembaga-Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen), Swasta dan Internasional.
- g. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi yang Terkait Dalam Penyediaan Maupun Penerimaan Data dan Informasi Dalam Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- h. Pemberian Bantuan Kepada Para Pejabat Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Hubungan Kerja Dengan Pemerintah (Lembaga-Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen), Swasta dan Internasional di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah.
- i. Pengumpulan dan Pengelola Data atau Informasi Tentang Masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi / Luar Daerah.
- j. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

5. Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya

Mempunyai tugas Melaksanakan Kegiatan Bidang Promosi Dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi:

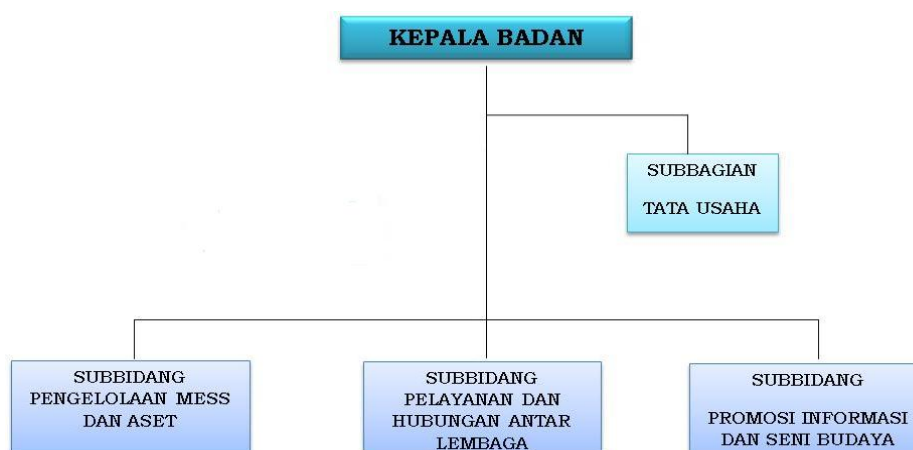
- a. Penyusunan Program Kerja Kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata.
- b. Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Informasi untuk Melakukan Kegiatan Promosi Pembangunan Daerah.
- c. Pelaksanaan Program Kerja Kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata di Tingkat Nasional dan Internasional.
- d. Pengkoordinasi Kegiatan Anjungan Jambi dan Taman Mini Indonesia Indah.
- e. Pelaksanaan dan Fasilitasi Kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Jambi, Meliputi Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pariwisata Baik di Dalam dan di Luar Taman Mini Indonesia Indah.
- f. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program dan Informasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Anjungan Jambi.
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Subbag/Subbid masing-masing. Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum ditentukan berdasarkan sifat, jenis

dan beban kerja. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi



Sumber : Bapegda Prov Jambi, April 2025, data diolah

2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Penghubung Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi didukung Sumber

Daya Manusia yang tersebar dalam Instansi Induk (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sampai dengan April 2025, tercatat sebanyak 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 5 orang Pejabat Struktural, 38 orang Pejabat Fungsional Umum dan 1 orang Penata Laksana Barang Terampil yang terbagi di Instansi Induk (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi), serta 43 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Total Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sampai dengan April 2025 tercatat sebanyak 87 orang.

Berdasarkan Bezetting Pegawai dan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil kondisi 31 Desember 2023, proyeksi kebutuhan pegawai Tahun 2024 berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 18 orang, dengan nomenklatur jabatan yang dibutuhkan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Gol.Ruang
			Jenjang Pendidikan	Jurusan	
1	2	3	4	5	6
1	JFT Perencana Pertama	1	S1/D4	Bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh kepala LKPP dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang	III/a

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Gol.Ruan g
			Jenjang Pendidikan	Jurusan	
1	2	3	4	5	6
				perencanaan, mendapat sertifikat atau surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan/ STTPL)	
2	JFT Analisis Kepegawaian Pertama	1	S1/D4	Bidang Ilmu kepegawaian, Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan	III/a
3	JFT Pranata Komputer Pertama	1	S1/D4	Sarjana Komputer/ Ilmu Komputer yang relevan dengan tugas dan jabatan yang relevan	III/a
4	JFT Arsiparis Pertama	1	S1/D4	Manajemen/ Kepegawaian/ Politik/ Administrasi/ Sosiologi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/d
5	Pengelola Keuangan	2	D3	Bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/d

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/ Gol.Ruan g
			Jenjang Pendidikan	Jurusan	
1	2	3	4	5	6
6	Pengadministrasi Umum	2	SLTA/D1/D 2	Manajemen perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
7	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	1	SLTA/D1/D 2	Bidang Listrik atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
8	Petugas Keamanan	6	SLTA/D1/D 2	Bidang yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
9	Pengemudi	2	SLTA/D1/D 2	Bidang yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/a
10	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	1	D3	Manajemen/Sosial/Politik/ Administrasi/ Sosiologi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan	II/d
	Jumlah	18			

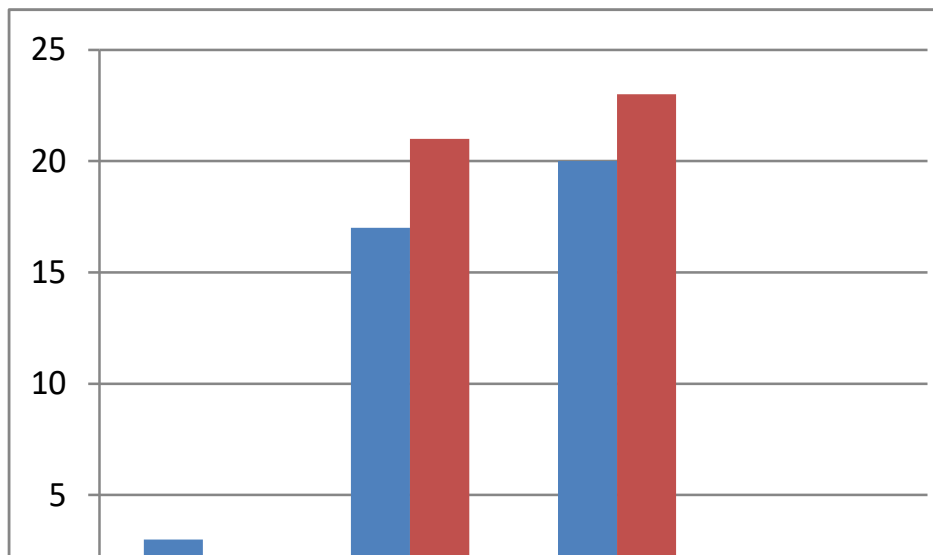
Sumber: Bapegda Prov Jambi, april 2025. Data diolah

Dengan demikian idealnya kondisi Sumber Daya Manusia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada april 2025 sebanyak 87 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 5 orang Pejabat Struktural, 1 orang Jabatan Fungsional Tertentu, 38 orang Jabatan Fungsional Umum dan 44 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terbagi di Instansi Induk (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi).

Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Jabatan Tahun 2025 dapat disajikan pada Grafik Histogram Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2

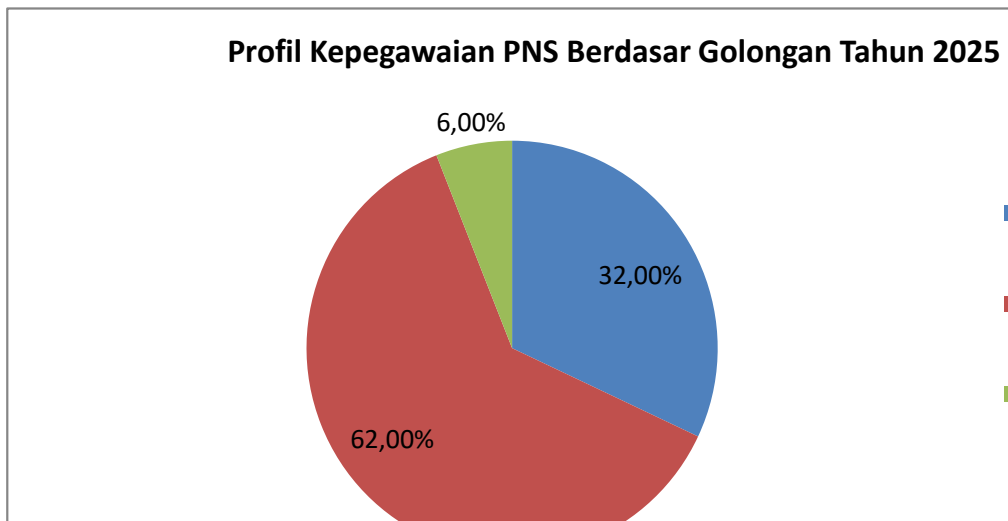
Profil Kepegawaian PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2025



Sumber: Bapegda Prov Jambi, per april 2025. Data diolah

Berdasarkan Golongan, 43 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada bulan april 2025 terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang atau 9,3 persen, Golongan III sebanyak 26 orang atau 60,5 persen, Golongan II sebanyak 13 orang atau 30,2 persen. Untuk jelasnya Profil Kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 berdasar golongan dapat disajikan pada Diagram Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3
Profil Kepegawaian PNS
Berdasarkan Golongan Tahun 2025



Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025. Data diolah

Berdasarkan Gambar 2.3 terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terutama untuk Jabatan Fungsional Umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal. Pegawai di Badan Penghubung Daerah sebagian besar merupakan pegawai Golongan III yakni sebanyak 25 orang atau 46 persen. Selanjutnya penyebaran jumlah pegawai PNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Kondisi April 2025

No.	Golongan	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I			
2	II	11	2	13
3	III	8	18	26
4	IV	2	2	4
Jumlah		21	22	43

Sumber : Bapegda Prov Jambi per april 2025 data diolah

Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin, jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terdiri dari 1 orang Eselon III a dan 4 orang Eselon IV a serta 39 orang Fungsional Umum, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.3.

Tabel.2.3

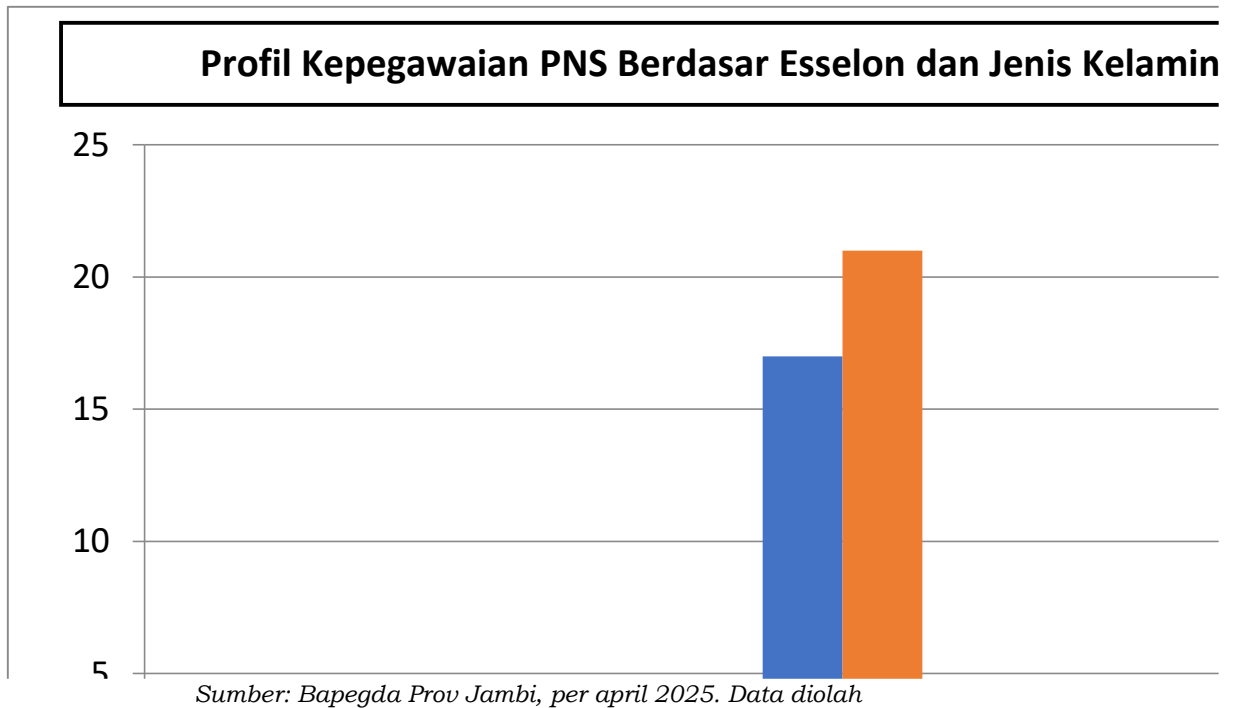
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin

No.	Eselonering	Jumlah Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	III.a	1	-	1
2.	IV.a	2	2	4
3.	Fungsional Umum	17	21	38
Jumlah		20	23	43

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025 data diolah

Profil Kepegawaian PNS berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4
 Profil Kepegawaian PNS
 Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2025



Dari Gambar 2.4 dapat dilihat bahwa di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana dari 43 orang jumlah Pegawai terdiri dari Laki-laki 20 orang (46 persen) dan Perempuan 23 orang (53,5 persen). Sedangkan yang menduduki Jabatan Struktural (Eselon) dari 4 Jabatan Struktural (Eselon) yang tersedia, di duduki 2 orang Laki-laki (20 persen) dan 2 orang Perempuan (20 persen). Demikian juga dengan Jabatan Fungsional Umum, dari 39 Pejabat Fungsional Umum terdiri dari 20 orang Laki-laki (46,5 persen) dan 23 orang Perempuan (53,5 persen). Jumlahnya seimbang sesuai dengan kondisi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi terdiridari; tamatan SLTP sebanyak 2 orang, tamatan SLTA

sebanyak 19 orang, tamatan Sarjana Muda (DIII) sebanyak 2 orang, tamatan Sarjana (S1) sebanyak 17 orang dan tamatan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

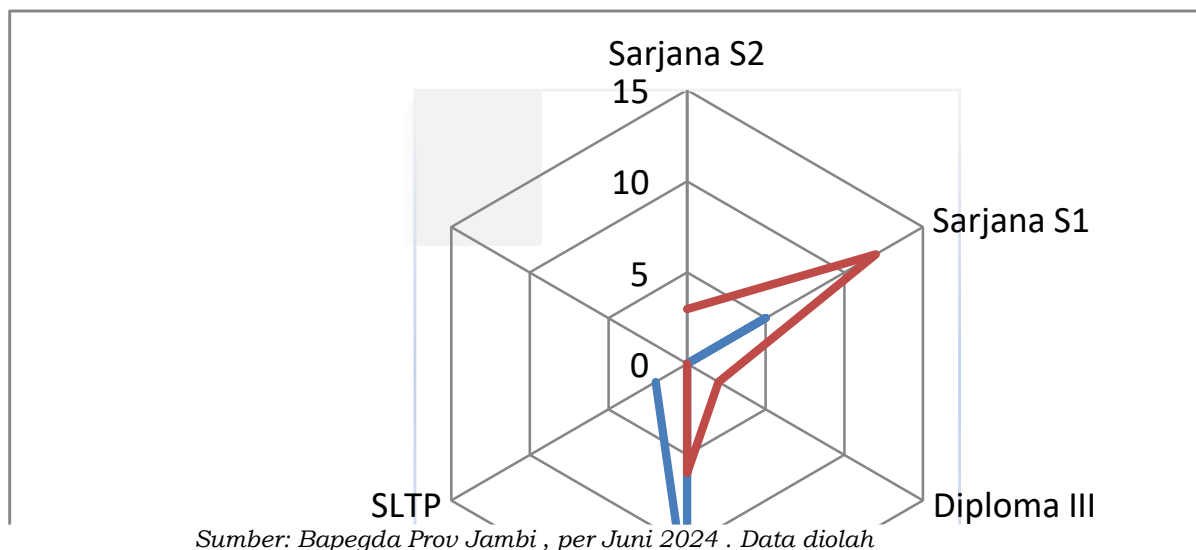
No.	Kualifikasi Pendidikan	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pasca sarjana (S2)	-	3	3
2.	Sarjana (S1)	5	12	17
3.	Sarjana Muda (DIII)	-	2	2
4.	SLTA	13	6	19
5.	SLTP	2	-	2
	Jumlah	20	23	43

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025. Data diolah

Tabel 2.4. menunjukkan bahwa berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan Pegawai PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, bila dilihat dari pendidikan SLTA ke atas, pegawai Laki- laki yang berpendidikan tamatan SLTP sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA untuk pegawai laki- laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Sarjana Muda (DIII) untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang. Sarjana (S1) pegawai laki – laki sebanyak 5 orang, perempuan sebanyak 12 orang, untuk tamatan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang pegawai perempuan.

Selanjutnya profil kepegawaian PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
 Profil Kepegawaian PNS
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Selanjutnya berdasarkan Tingkat Usia, jumlah PNS Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terdiri dari: 43 orang. Usia 36-40 tahun, 4 orang; usia 41-45 tahun, 13 orang; usia 46-50 tahun, 10 orang; usia 51-55 tahun, 9 orang; dan usia 56-60 tahun, 7 orang seperti ditunjukkan Tabel 2.5.

Tabel 2.5
 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin
 Kondisi April 2025

No.	Tingkat Usia (tahun)	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	31 - 35	-		
2	36 - 40	-	4	4
3	41 - 45	8	5	13
4	46 - 50	5	4	9
5	51 - 55	4	5	9
6	56 - 60	3	4	7
Total		20	23	43

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per Juni 2024. Data diolah

Untuk jelasnya nama-nama Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada posisi April 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini adalah daftar Aparatur Sipil Negara Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tanggal 1 April 2025. Sedangkan 44 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) terdiri dari 33 orang berjenis kelamin Laki-laki dan sisanya sebanyak 11 orang berjenis kelamin Perempuan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.

**Daftar Nama Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi**

No	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan	TMT SK Pertama	Masa Kerja	
		L	P					Tahun	Bulan
1	ANDRI WIDAYANTO	✓		19-03-1986	Administrasi Umum	SMK (Teknik Elektro)	01-04-2005	19	3
2	RITNO	✓		21-07-1977	Petugas Pelayanan dan HAL	SMP	21-07-2006	17	11
3	FERIANTO, ST	✓		15-02-1980	Administrasi Umum	S1 (Teknik Mesin)	15-06-2007	17	1
4	EPENDI	✓		23-10-1967	Petugas Keamanan	SMA	25-03-2008	16	3
5	SUYADI	✓		07-05-1969	Teknisi Listrik dan AC	SMA(IPS)	25-03-2008	16	3
6	JOKO SULISTYONO	✓		14-04-1985	Teknisi Listrik dan AC	SMA (IPA)	01-06-2008	16	1
7	AGUNG PRATAMA	✓		24-05-1990	Administrasi Umum	SMA (IPS)	01-06-2008	16	1
8	YULY		✓	15-02-1976	Pengelolaan Pelayanan Mess	SMP	01-04-2010	14	3
9	DEDI SETIAWAN	✓		04-06-1983	Pengelolaan Pelayanan Mess	SMA (IPS)	01-04-2010	14	3
11	SUPRIYANTO	✓		29-12-1979	Petugas Pelayanan Bandara	D1(Manajemen Informatika)	18-01-2011	13	5
12	MARHADI, S.Pd.I	✓		16-09-1982	Petugas Pelayanan Bandara	S1 (Pendidikan Agama Islam)	20-01-2012	12	5
13	AMRULLAH, ST	✓		04-08-1977	Administrasi Umum	S1 (Teknik Elektro)	02-01-2013	11	6
14	HAROMAINI	✓		24-11-1984	Pengelolaan Pelayanan Mess	SMA (IPS)	01-04-2014	10	3
15	ELINA DARWANI, S.Sos		✓	23-03-1981	Administrasi Umum	S1 (Ilmu Sosial)	01-10-2014	9	9

16	WIDHI SASONGKO JATI	✓		26-07-1986	Administrasi Umum	SMA(IPS)	02-04-2018	6	3
17	AINAYAH KHAERUNNISAI		✓	28-08-1998	Operator Komputer	SMA (IPS)	02-04-2018	6	3
18	WAGIMIN	✓		27-01-1988	Teknisi Listrik dan AC	SMA	02-05-2018	6	2
19	PUTRI THARA BANOWATI, S.M		✓	13-08-2000	Administrasi Umum	S1 (Manajemen)	03-07-2018	6	0
20	MUHAMMAD BAGAS RIGIASTA	✓		25-12-1999	Administrasi Umum	SMA (IPA)	01-08-2018	5	11
21	HARRY SETYAWAN, SH	✓		24-04-1995	Petugas Layanan Hubungan Antar Lembaga	S1 (Ilmu Hukum)	01-10-2018	5	9
22	FAISOL UDAYA	✓		06-09-1975	Pengelola Surat	SMA (IPS)	10-06-2019	5	1
23	AJAT SUDRAJAT	✓		16-06-1989	Administrasi Umum	SMA	14-06-2019	5	1
24	SYAMSUDIN INDRANEGARA	✓		16-06-1981	Pengelola Surat	SMA	03-10-2019	4	9
25	MUHAMMAD YANTO	✓		02-08-1995	Petugas Pelayanan Bandara	SMA	01-10-2019	4	9
26	FERDIAN SUBAGJA	✓		10-11-1991	Administrasi Umum	SMA	01-07-2020	4	0
27	AZANI	✓		12-05-1973	Administrasi Umum	SMA	01-10-2020	3	9
28	ARPITAYANI, SE		✓	12-04-1992	Operator Komputer Pengelolaa Wisma	S1 (Ekonomi Pembangunan)	01-10-2020	3	9
29	MUHAMMAD IHSAN SARHAN, A.Md	✓		14-07-2001	Operator Komputer	D3 (Manajemen Informatika)	01-10-2020	3	9
30	SOPAN SOPIAN	✓		07-09-1986	Petugas Keamanan	SD	1-11-2020	3	8
31	RUDI HARTONO	✓		10-08-1978	Teknisi Listrik dan AC	SMA	03-05-2021	3	2
32	DEIT TANAMAL	✓		01-01-1979	Petugas Layanan Hubungan Antar Lembaga	SMA	01-05-2021	3	2
33	IDA FITRIDHA SYARI, A.Md		✓	26-10-1985	Administrasi Umum	D3 (Manajemen Informatika)	01-07-2021	3	0
34	RIZKA RESTINA, S. Ikom		✓	13-07-1987	Operator Komputer Pengelolaa Wisma	S1 (Ilmu Komunikasi)	02-01-2022	2	6

35	RA ELVIN RISKI HAMIJAYA, SE		✓	08-01-1994	Pengelolaan Surat	S1 (Ekonomi Manajemen)	02-01-2022	2	6
36	RAESARRAH S, SE		✓	08-01-1991	Administrasi Umum	S1 (Akuntansi)	03-01-2022	2	6
37	MAHESA RAJA RABBANI	✓		10-08-2003	Operator Komputer Pengelolaa Wisma	SMK (Multimedia)	14-01-2022	2	6
38	YOGI BISMANTORO	✓		08-11-1987	Petugas Pelayanan Bandara	D1 (Perhotelan)	02-06-2022	2	5
39	FERI SETIAWAN	✓		21-01-2000	Operator Komputer Pengelolaa Wisma	SMA	23-09-2023	1	9
40	MAHARANI KAMILIA		✓	22-07-2004	Operator Komputer	SMA	23-09-2022	1	9
41	AMRI SETIAWAN, S.Psi	✓		04-05-1994	Operator Komputer	S1 (Psikologi)	01-01-2023	1	6
42	KRISDA MONIKA, SE		✓	09-07-1999	Operator Komputer	S1 (Hukum Pidana Islam)	02-01-2023	1	6
43	NANA MUKYANA	✓		11-08-1975	Petugas Layanan Hubungan Antar Lembaga	SMA	01-03-2023	1	4

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per april 2025. Data diolah

Tabel 2.6. menunjukkan bahwa berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi terdiri dari : tamatan SD sebanyak 1 orang, tamatan SLTP sebanyak 2 orang, tamatan SLTA sebanyak 23 orang, tamatan Sarjana Muda (DI/DIII) sebanyak 4 orang, dan tamatan Sarjana (S1) sebanyak 12 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Kualifikasi Pendidikan	Pegawai Tidak tetap (PTT)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sarjana (S1)	5	6	11
2.	Sarjana Muda (DI /DIII)	3	1	4
3.	SLTA	22	2	24
4.	SLTP	3	1	4
5.	SD	1	-	1
	Jumlah	34	10	44

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025. Data diolah

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi telah tersedia peralatan pendukung kerja yang berpengaruh dan mendukung operasional organisasi yang meliputi ruang kerja, ruang rapat, meubelair, laptop ataupun perangkat komputer lengkap (CPU, Monitor, Printer, Keyboard, UPS), alat komunikasi (Telepon, Faksimili, Jaringan Internet dan TV Kabel) perangkat elektronik dan sarana transportasi baik berupa kendaraan dinas Pejabat (mobil dan sepeda motor) maupun kendaraan dinas operasional pelayanan lainnya.

Kondisi sarana prasarana di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sejauh ini telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana saat ini yang ada dan tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

Tabel 2.8.

Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

No	Jenis/Merk	Jumlah	Kondisi
A	KENDARAN RODA EMPAT	19	Baik
1	Toyota Fortuner	3	Baik
2	Toyota Avanza	2	Kurang Baik
3	Isuzu Panther	1	Kurang Baik
4	Honda CR-V	1	Kurang Baik
5	Honda City	1	Kurang Baik
6	Mitsubshi L300	1	Kurang Baik
7	Isuzu ELF	1	Kurang Baik
8	Toyota HIACE	3	Baik
9	Toyota HIACE	1	Kurang Baik
10	Toyota Kijang Innova	1	Baik
11	Toyota Kijang Innova	1	Kurang Baik
12	Toyota Alphard	1	Baik
13	Honda HR-V	2	Baik
B	KENDARAAN RODA DUA	10	Baik
1	Honda Supra X 125 CW	4	Baik
2	Honda NF125 CRX	3	Baik
3	Honda NFI 125 CRX	1	Hilang
4	Suzuki Thunder 125	2	Rusak

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per april 2025. Data Diolah

Selain Kendaraan dinas untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ada pula peralatan dan teknologi penunjang kegiatan Administrasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertera pada tabel 2.9

Tabel 2.9.

Sarana dan Prasarana Peralatan Dan Teknologi Penunjang Kegiatan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Komputer PC	36	Unit	25		11
2	Laptop	17	Unit	7	-	10
3	Printer	31	Unit	20	-	11
4	Faximili	1	Unit	-	-	1
5	Meja Rapat	23	Buah	23	-	-
6	Meja Kerja	28	Buah	28	-	-
7	Meja Nakas	167	Buah	167		
8	Kursi rapat	82	Buah	67		15
9	Kursi Kerja	31	Buah	28	-	3
10	Kursi Futura	245	Buah	233		12
11	Lemari Arsip	6	Buah	6	-	-
12	Lemari Kayu	41	Buah	41		
13	Lemari Kaca	14	Buah	14		
14	Filling Kabinet	15	Buah	12	3	-
15	Brankas	4	Buah	4	-	-
16	AC Standing	4	Unit	4	-	-
17	AC Caseete	8	Unit	4	-	4
18	AC Split	135	Unit	79	-	56
19	TV	94	Unit	54	-	40
20	Mesin Cuci	9	Unit	5	-	4
21	Kulkas	35	Unit	32	-	3

22	Kompore Gas	4	Unit	3		1
23	Kitchen Set	18	Buah	15	-	3
24	Dispenser	10	Buah	10	-	-
25	Pompa Air	14	Buah	9		5
26	Telepon	59	Unit	57	-	2
27	Mesin Foto Copy	2	Unit	2	-	-
28	Sofa	48	Set	40	6	3
29	Electric Generating Set	2	Unit	1	1	-

Sumber: Bapegdaprov Jambi, per april 2025, Data Diolah.

Total aset yang dikelola Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 senilai Rp.45.332.434.045,88 (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat juta empat puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen), diluar nilai Tanah dan Aset Lainnya, dengan kondisi BAIK. Jelasnya rincian aset ini tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.

Daftar Aset Badan

Penghubung Daerah Provinsi Jambi Per Desember 2024

No	Jenis Peralatan	Nilai (Rp)	Keterangan / Kondisi
1	Tanah	-	Tercatat di Biro Umum
2	Peralatan dan Mesin	15.593.523.221,70	Baik
3	Gedung dan Bangunan	59.116.986.664,00	Baik
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	184.410.000,00	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	384.185.292,00	Baik
6	Akumulasi penyusutan	(30.154.249.816,66)	
7	Aset Lainnya	2.222.410.803,35	
8	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	(2.222.410.803,35)	
	Total	45.332.434.045,88	

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per Desember 2024. Data Diolah

Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengacu pada sasaran sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

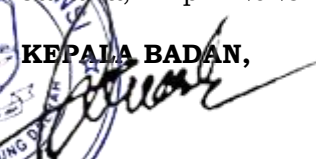
Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari Nilai IKM; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Dari Mess Jambi dan Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Jambi TMII.


Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai Tahun 2029 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat Nya kualitas layanan Penghubung	1. Nilai IKM	80	80,5	84	84	84	21,6	27,39	75,97	85,53	83,72	27	34,02	90,44	99,4	99,67
		2. Nilai AKIP	60,05	60,10	60,10	69	76	97,88	86,14	86,14	75,05	70,40	163	143,33	143,33	108,77	92,63
2	Meningkatn ya pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pendapatan retribusi Daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakartan	Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah dari Mess Jambi (Rp 000)	1,5	420.000	1.357.350	1.319.800	1.761.419	0,58	267.400	723.550	904.800	1.328.900	38,87	63,67	53,31	68,56	74,44
		Jumlah Kunjungan Wisata ke Anjungan Jambi TMII	1	1	12	7210	8652	0,05	12,21	15	16467	15085	5	1,2	125	258,39	174,35

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per April 2025. Data Diolah

Jakarta, April 2025
KEPALA BADAN,

Drs. AMRULSYAH
NIP. 19700107 199101 1 001



Capaian realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai 2024 dan ratio pertumbuhan berfruktusasi berdasarkan anggaran APBD. Untuk tujuan dan sasaran dari Badan Penghubung Daerah yaitu meningkatnya seni budaya, promosi dan informasi dengan indikator adalah jumlah kunjungan dari tahun 2021 sampai 2024 dengan rata rata ratio pertumbuhan sebesar 112,79%.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang berada di Jakarta Pusat, berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi Usaha Jasa Umum yang membantu masyarakat Jambi sebagai tempat menginap selama berada di Jakarta, ini sangat membantu baik masyarakat maupun PNS yang menjalankan aktifitasnya di Jakarta. Jumlah kamar yang tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebanyak 41 kamar yang disewakan sebanyak 38 kamar terdiri dari 4 kamar VIP, 34 kamar Standar (kondisi layak sewa) dan 2 kamar VVIP tidak dijual/sewa khusus diperuntukkan untuk Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. 1 kamar VIP untuk Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Perkembangan Pendapatan Daerah Jambi dari Retribusi Jasa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta dari Tahun 2020 s/d 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebelumnya.

Pendapatan retribusi daerah yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasar kode rekening SIMDA Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi diperoleh dari :

1. Retribusi Pemakaian Ruangan terdiri dari :
 - 1.1 Sewa Ruang Barak di Anjungan Jambi TMII;
 - 1.2 Sewa Aula Bawah Rumah Adat Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit;
 - 1.3 Sewa Aula Balai Mufakat Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit;
 - 1.4 Sewa Kamar di Anjungan Jambi TMII sebanyak 5 (lima) kamar;

- 1.5 Sewa Kantin Anjungan Jambi TMII sebanyak 1 (satu) unit.
2. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggerahan / Villa, (Jasa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Cikini) terdiri dari sewa 5 (lima) kamar VIP dan 34 (tiga puluh empat) kamar standar.

Tabel 2.12 memperlihatkan retribusi pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 sampai Tahun 2024 terutama dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mendekati target dan selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 45 %, belum tercapai target ini karena yang jumlah tamu yang menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan Anjungan Jambi TMII masih belum maksimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

1. Jumlah PNS yang menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi masih rendah hal ini karena beberapa kegiatan yang dilakukan mendapat fasilitasi akomodasi.
2. Kondisi kamar dan ruang di Anjungan Jambi TMII yang kurang layak dijual karena mengalami kerusakan dari prasana yang ada.
3. Belum optimalnya menjalankan regulasi tentang menginap di Mess Jambi di Jakarta.

Dan khususnya pada tahun 2024 rasio capaian retribusi pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berada di angka yang paling tinggi mencapai angka sebesar Rp. 74,44%. Capaian ini merupakan bentuk dari kinerja seluruh peran aktif ASN dan PTT Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan semua regulasi yang berkaitan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk indikator kunjungan wisata Anjungan Jambi TMII dari tahun 2020 – 2024 pada umumnya meningkat dan mencapai target. Tetapi pada tahun 2021, jumlah tamu yang berkunjung menurun drastis dengan rasio sebesar 1% hal ini

disebabkan karena terjadinya Pandemi *Covid-19* di Indonesia dan Dunia.

Disamping itu rata-rata setahun kegiatan promosi seni dan budaya daerah Jambi yang dilaksanakan di Anjungan Jambi TMII sebanyak 5 (lima) kali. Kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara dengan rata rata capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 sebesar 112,78%. Adapun Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12

Anggaran Dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2025

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.360	14.569	14.914	20.014	14.157	11.495	12.403	14.589	19.343	13.447	93	85,13	97,82	96,64	94,98	15,20	14,26
Program Pelayanan Penghubung	258	526	744	1.329	491	257	516	734	1.323	476	99	98,14	98,67	99,54	97,02	66,96	N/A

Sumber: Bapegda Prov Jambi, April 2025. Data Diolah

Capaian Anggaran APBD Provinsi Jambi yang tersedia untuk Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dari Tahun 2020 – 2024 yang terdiri dari 2 program penunjang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 15,30% dan Program Pelayanan Penghubung dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 66,96%, namun terdapat penurunan anggaran di tahun 2021 dikarenakan *refocusing covid-19* dan di tahun 2024 ini karena alokasi anggaran untuk persiapan pemilihan kepada daerah(Pilkada), sehingga anggaran yang di anggarkan mengalami *refocusing*.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya tamu Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, sangat ditentukan oleh standard pelayanan dan kemampuan manajemen organisasi untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pemilihan strategi dan kebijakan.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- ❖ Domisili Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang berada di Ibukota DKI Jakarta.
- ❖ Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
- ❖ Adanya kerjasama antar Lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga non pemerintah.

- ❖ Sistem dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mulai tertata dengan baik.
 - ❖ Memiliki budaya daerah yang beragam yang dapat menarik minat masyarakat.
 - ❖ Terjalannya hubungan yang harmonis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- b. Faktor Ancaman (*Threat*)
- ❖ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang prima.
 - ❖ Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor dan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang memadai.
 - ❖ Tuntutan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat.
 - ❖ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi layanan administrasi umum dan keuangan.
 - ❖ Kualitas SDM yang belum memadai.
 - ❖ Banyaknya hotel dan penginapan sejenis lainnya disekitar Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Jambi

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2025-2029 perlu ditingkatkan. Evaluasi ke depan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, permasalahan pokok yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah :

1. Rendahnya capaian target retribusi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dengan masalah sebagai berikut :
 - 1)Belum optimalnya pelayanan publik, disebabkan oleh :

- a. Sarana dan Prasarana Mess/Kantor yang masih belum memadai,
 - b. Kurangnya Pelatihan / BIMTEK,
 - c. Tidak mengikuti perkembangan IPTEK.
- 2) Banyaknya hotel dan penginapan sejenis di sekitar Mess Jambi, disebabkan oleh kurangnya promosi tentang keberadaan Mess Jambi.
- 3) Kurangnya minat masyarakat dan PNS untuk menginap di Mess Jambi, disebabkan oleh:
- a. Belum maksimalnya menjalankan regulasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mengatur PNS untuk menginap di Mess Jambi seperti Perda, Pergub dan ingub.
 - b. Aplikasi pemesanan mess Jambi yang belum optimal dalam pelaksanaan.
- 4) Kegiatan Promosi Budaya Daerah yang masih belum optimal disebabkan oleh:
- a. Perubahan Pengelolaan Anjungan Taman Mini Indonesia yang semula di kelola oleh yayasan Harapan Kita ke Pemerintah sehingga membuat beberapa kegiatan promosi disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
 - b. Masih kurangnya pelaksanaan Kegiatan Pagelaran Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan Provinsi Jambi.
 - c. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Seni Budaya.
2. Belum optimalnya tugas dan fungsi Badan Penghubung, dengan masalah sebagai berikut:
- Masih rendahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, disebabkan oleh faktor belum tersosialisasikanya tugas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dapat dilihat dari masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama ini . Untuk jelasnya masalah pokok, masalah dan akar masalah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 2.13
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya capaian target retribusi Badan Penghubung Daerah Provinsi Daerah	1. Belum optimalnya pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana Mess / Kantor yang masih belum memadai • Kurangnya Pelatihan / BIMTEK • Belum optimal dalam perkembangan IPTEK • Kurang memahami dan menguasai Tupoksi masing-masing ASN
		2. Banyaknya hotel dan penginapan sejenis di sekitar Mess Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya promosi tentang keberadaan Mess Jambi.
		3. Kurangnya minat masyarakat dan PNS untuk menginap di Mess Jambi	<p>a. Belum maksimalnya menjalankan regulasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mengatur PNS untuk menginap di Mess Jambi seperti Perda, Pergub dan ingub.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letak gerografis Mess Jambi yang kurang strategis

		4. Masih kurangnya Kegiatan Promosi Budaya Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan pagelaran seni budaya dan pameran produk unggulan Provinsi Jambi. • Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan seni budaya.
2.	Belum optimalnya tugas dan fungsi badan Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersosialisasikannya tugas dan fungsi badan Penghubung kepada Kabupaten Kota.

Sumber: Bapegda Prov Jambi, April 2025. Data Diolah.

2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

**“ Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**

- Jambi MANTAP** : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan, aspek sosial budaya, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.
- Berdaya saing** : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Berkelanjutan** : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5

(lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

2.6.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis.** Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, melibatkan seluasnya-luasnya peran masyarakat dalam proses pembangunan serta adaptif dengan perubahan zaman. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
2. **Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan Daerah.** Daya saing daerah merupakan refleksi dari kemajuan dan produktivitas daerah tersebut. Daya saing daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas pada tiga lini, yaitu produktivitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong oleh efisien dan produktivitas yang didorong oleh inovasi. Sektor-sektor dalam bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata adalah sektor unggulan Provinsi Jambi yang dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan dukungan infrastruktur yang handal, akses permodalan dan pasar serta ekosistem inovasi yang baik. Ukuran yang digunakan untuk melihat peningkatan daya saing daerah ini adalah Indeks Daya Saing Daerah.

3. **Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara social.**
4. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.** Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Modal Manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tujuan ini tercapai.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital.** Menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital, serta jujur dan bertanggung jawab dengan hasil kinerja yang terukur. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan indeks integritas nasional Provinsi Jambi, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan indeks pelayanan publik.
2. **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.** Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bergantung pada peranan pemerintah dan masyarakat. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi pembangunan serta

menyampaikan pendapat tanpa intervensi akan mengurangi gesekan-gesekan yang akan mengganggu proses pembangunan daerah. Untuk itu Indeks Aspek Kebebasan pada Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Keterbukaan Informasi menjadi indikator yang digunakan untuk melihat peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Jambi.

3. **Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Daerah**

Penyediaan Infrastruktur yang handal pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD ini. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio konektivitas, persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, akses terhadap air minum layak, konsumsi listrik per kapita dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.

4. **Meningkatnya stabilitas ekonomi makro.**

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi makro adalah dengan mengendalikan inflasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, swasembada pangan, serta meningkatkan investasi di daerah. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah inflasi, rasio kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, indeks ketahanan pangan, ICOR dan PDRB perkapita.

5. **Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah**

Skala ekonomi masyarakat dan daerah didorong dengan meningkatkan nilai tambah lapangan usaha yang

memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong industrialisasi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Tidak hanya mendorong sektor sekunder, sektor pariwisata dan sektor tersier lainnya juga akan didorong agar mengalami peningkatan nilai tambah. Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang besar terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu, UMKM yang ada di Provinsi Jambi akan didorong untuk lebih produktif melalui pemberian akses permodalan yang lebih luas. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah tingkat inklusi keuangan provinsi, persentase nilai impor terhadap PDRB ADHB, rasio PDRB penyediaan makan dan minum, distribusi PDRB sektor tersier, rasio PDRB industri pengolahan, Distribusi PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

6. Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi

Ekosistem inovasi dibutuhkan untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi di Provinsi Jambi. Para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, korporasi, komunitas, institusi pendidikan dan lain-lain akan berkolaborasi mewujudkannya. Melalui jaringan informasi yang terbentuk dalam ekosistem inovasi, masing-masing pemangku kepentingan dapat berbagi informasi dan sumber daya yang dapat membantu satu sama lain mengatasi permasalahan yang ada. Keberhasilan ekosistem inovasi di Provinsi Jambi akan

ditandai oleh indikator meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya indeks inovasi daerah dan pengeluaran IPTEK dan Inovasi (Persen APBD).

7. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**

Pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu pada tujuan sila kelima Pancasila dan Pasal 27 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi adalah penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatnya indeks produktivitas tenaga kerja.

8. **Meningkatnya kualitas lingkungan** Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

9. **Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat**

Pesisir dan dan sumber daya kelautan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Namun sumber daya laut yang banyak belum bisa menjamin penduduk di wilayah pesisir dapat hidup dengan layak karena pemanfaatan sumber daya yang kurang baik. Keberhasilan sasaran meningkatnya pemanfaatan

sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dilihat dari indikator peran sektor perikanan dalam PDRB, rata-rata konsumsi kalori ikan perkapita perhari dan persentase penduduk miskin ekstrim di wilayah pesisir.

10. **Meningkatnya kualitas hidup masyarakat** Kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup dan prevalensi stunting menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
11. **Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender** Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah. Selain itu, kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat perekat bangsa. Oleh karena itu sumber daya manusia yang berkebudayaan menjadi salah satu sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD ini, yang ditandai dengan indeks pembangunan kebudayaan. Sementara sebagai bentuk pengarusutamaan gender, optimalisasi peran perempuan perlu terus didorong. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi Jambi belum optimal dan hanya pada bidang bidang

tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Ketimpangan Gender.

2.7 Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

2.7.1 Pengertian Renstra

Renstra (Rencana Strategis) ialah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029 yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang akandicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan peluang, dan tantangan yang ada.

Oleh karena Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di bawah Pemerintah Provinsi Jambi, maka Visi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yakni ;

“Mewujudkan Jambi *MANTAP* Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

Sedangkan Misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah Misi kesatu dari 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

“ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelolapemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi”

2.7.2 Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan adalah serangkaian asumsi mengenaikondisi yang perlu diciptakan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program. Faktor penentu keberhasilan disini antara lain :

1. Tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai komitmen tinggi dan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta; serta kebijakan otonomi daerah yang didukung pendanaan yang cukup memadai guna pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi menjadi faktor penentu keberhasilan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Dukungan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 akan mampu menjawab atau mengatasi tantangan kondisi eksternal dimana pengawasan dari berbagai elemen masyarakat semakin tinggi dan pola pikir yang semakin kritis.
3. Adanya peluang otonomi daerah dan tata kelola birokrasi dan hubungan kerjasama antar instansi yang semakin baik akan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada serta tantangan-tantangan yang muncul dalam mencapai visi dan misi organisasi.

2.8 Penentuan Isu Strategis

2.8.1 Penentuan Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Berangkat dari isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Isu Strategis Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi lima tahun ke depan adalah :

1. Pendapatan Mess Jambi yang belum memenuhi target.
2. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah.
3. Belum optimalnya tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terutama dalam koordinasi dengan Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Berangkat dari 3 (tiga) misi maka dipilih 1 Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, yaitu : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”, maka tujuan pembangunan daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diambil dari Tujuan 1 (satu) dari 3 (tiga) Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis” dengan demikian tujuan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 adalah :

TERWUJUDNYA LEMBAGA YANG MELAYANI DAN BERBASIS DIGITAL

3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah sasaran 1 (satu) dari 11 (sebelas) sasaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 –2029, yaitu :

Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital.

Dengan demikian sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah: **Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung**. Dari sasaran tersebut maka diturunkan dalam indikator sasaran yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat adalah nilai indeks dari hasil survey terhadap kepuasan dari responden yang menginap di mess Jambi sesuai dengan Permenpan nomor 14 tahun 2017.

2. Persentase Pelayanan Penghubung yang optimal

Pengukuran persentase ini dilakukan dengan indikator jumlah kunjungan ke anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia, Jumlah pelayanan terhadap pimpinan yang difasilitasi dan dilakukan ke Kementerian dan Lembaga serta jumlah responden yang menginap Mess Jambi.

3. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan kategori reformasi dengan yang kategorikan dalam huruf berupa : AA, A, BB, B, CC, C dan D

4. Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi

Persentase peningkatan realisasi penerimaan retribusi adalah target realisasi tahun berjalan dikurangi target realisasi tahun sebelumnya dibagi target realisasi tahun sebelumnya.

5. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah

Hasil monev merupakan hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya Lembaga yang Melayani dan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik (IPP)			8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3
			Meningkatnya kualitas layanan penghubung	IKM Layanan Penghubung	83,7	83,8	84	84,05	84,1	84,15	84,2
				Persentase Pelayanan Penghubung yang optimal	66,7	71,7	76,7	80	82,5	84	86,5
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,4	70,7	70,75	70,8	70,85	70,9	70,95
				Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi	33,5	14,4	14,8	15	15,3	15,5	15,8
				Hasil monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	8	70,01	71	72	73	74	75

Sumber :Bapegdaprov. Jambi September 2025. Data Diolah.

3.3. Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Sebagai langkah lanjut dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 –2026 maka diperlukan suatu strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun (2025-2029). Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program yang mendukung terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029.

Adapun Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, sebanyak 14 (empat belas) Strategi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas ASN melalui Pelatihan Seminar dan Workshop
2. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif
3. Meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat
4. Meningkatkan ASN yang memiliki jiwa inisiatif dan solusi
5. Menciptakan profesionalisme bertanggungjawab dan dapat diandalkan
6. Meningkatkan fasilitas menunjang layanan pimpinan
7. Membangun jaringan komunikasi hubungan yang baik antar lembaga
8. Membangun kerjasama kementrian/lembaga/swasta lainnya dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan event-event Promosi Budaya dan kegiatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek
9. Mengadakan Kegiatan Seni Budaya yang menarik dan beragam melalui festival Seni Budaya, Pertunjukan Seni budaya, Pameran

10. Tersusunnya Regulasi tentang Pengelolaan Mess
11. Membangun penguatan system dan prosedur
12. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku Jabatan dan lintas sector
13. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi

3.4. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Untuk melaksanakan kelima Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, maka ada 6 (enam) Arah Kebijakan yang diambil Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Melakukan survey jejak pendapat pelayanan pimpinan.
2. Meningkatkan kompetensi ASN pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
3. Melakukan koordinasi kerjasama hubungan antar Kementrian /lembaga/swasta lainnya dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan event-event Promosi Budaya dan kegiatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek
4. Mengadakan event-event Promosi Seni Budaya dan Produk Unggulan
5. Meningkatkan kualitas penunjang dalam penyelenggaraan Promosi Seni Budaya
6. Melakukan survei jejak pendapat pelayanan publik
7. Meningkatkan kompetensi SDM
8. Membangun Inovasi layanan berbasis Teknologi pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
9. Tersusunnya regulasi tentang tata kelola menginap di Mess Jambi
10. Memanfaatkan Teknologi untuk Fasilitasi layanan
11. Meningkatkan pemeliharaan Gedung dan Jumlah sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

12. Mempedomani peraturan tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

13. Pemanfaatan Teknologi

14. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Untuk jelasnya lima Strategi dan tujuh Arah Kebijakan pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.
Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2025-2029

VISI	“Terwujudnya Jambi <i>MANTAP</i> (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) dibawah Ridho Allah SWT”		
MISI I	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung <i>e-government</i> yang terintegrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Lembaga yang melayani dan berbasis digital	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	1. Meningkatnya kualitas ASN melalui Pelatihan Seminar dan Workshop	1. Melakukan survey jajak pendapat pelayanan pimpinan 2. Meningkatkan kompetensi ASN pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
		2. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif	
		3. Meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat	
		4. Meningkatkan ASN yang memiliki jiwa inisiatif dan solusi	
		5. Menciptakan profesionalisme bertanggungjawab dan dapat diandalkan	
		6. Meningkatkan fasilitas menunjang layanan pimpinan	
		7. Membangun jaringan komunikasi hubungan yang baik antar lembaga	
		8. Membangun kerjasama kementerian/lembaga /swasta lainnya dan	3. Melakukan koordinasi kerjasama hubungan antar

		<p>Kabupaten/Kota dalam melaksanakan event-event Promosi Budaya dan kegiatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek</p> <p>9. Mengadakan Kegiatan Seni Budaya yang menarik dan beragam melalui festival Seni Budaya, Pertunjukan Seni budaya, Pameran</p>	<p>Kementrian /lembaga/swasta lainnya dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan event-event Promosi Budaya dan kegiatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek</p> <p>4. Mengadakan event-event Promosi Seni Budaya dan Produk Unggulan</p> <p>5. Meningkatkan kualitas penunjang dalam penyelenggaraan Promosi Seni Budaya</p>
		<p>10. Tersusunnya Regulasi tentang Pengelolaan Mess</p>	<p>6. Melakukan survei jajak pendapat pelayanan public</p> <p>7. Meningkatkan kompetensi SDM</p> <p>8. Membangun Inovasi layanan berbasis Teknologi pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi</p> <p>9. Tersusunnya regulasi tentang tata kelola menginap di Mess Jambi</p> <p>10. Memanfaatkan Teknologi untuk Fasilitasi layanan</p> <p>11. Meningkatkan pemeliharaan Gedung dan Jumlah sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi</p>
		<p>11. Membangun penguatan system dan prosedur</p> <p>12. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku Jabtan dan lintas sector</p> <p>13. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi</p>	<p>12. Mempelajari peraturan tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>13. Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>14. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi</p>

Sumber : Bapegdaprov.Jambi Oktober 2025.Data Diolah

Strategi dan arah kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan sebagaimana tabel tersebut dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, yang pada tahap selanjutnya dijabarkan kembali dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilakukan secara bertahap per tahun selama lima tahun.

Selaras dengan strategi dan kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, maka Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebanyak 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

Kegiatan /Sub Kegiatan:

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Kegiatan/Sub Kegiatan:

2.1. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

2.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat

2.1.2. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

2.1.3. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

2.1.4. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

2.1.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

4.2. Pendanaan

Pendanaan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi bersumber dari APBD Provinsi Jambi. Untuk jelasnya dana yang diperlukan per masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)												Unit Kerja Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	Targe t	Rp jt	targe t	Rp jt	targe t	Rp jt	targe t	Rp jt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Nilai AKIP 2.Persentase Peningkatan Target Penerimaan Retribusi 3.Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	13.186		17.653		21.930		24.938		28.396		32.374		114.196	Badan Penghubung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-		-		22.000		25.300		29.095		33.459		109.854	Badan Penghubung

	Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	10 Laporan	11.000	10 Laporan	12.650	10 Laporan	14.547	10 Laporan	16.729	50 Laporan	54.927	Badan Penghubung
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	12 Laporan	11.000	12 Laporan	12.650	12 Laporan	14.547	12 Laporan	16.729	60 Laporan	54.927	Badan Penghubung
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang difasilitasi	7.151		7.475		8.483		9.756		11.220		12.903		49.839	Badan Penghubung
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.725	47 Orang	7.102	50 Orang	8.018	60 Orang	9.221	70 Orang	10.604	80 Orang	12.194	307 Orang	47.141	Badan Penghubung
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	425.280	12 Dokumen	372.628	12 Dokumen	465.728	12 Dokumen	535.587	12 Dokumen	615.925	12 Dokumen	708.314	60 Dokumen	2.698	Badan Penghubung
Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Penataan Administrasi	205.500		207.900		432.848		467.775		507.941		554.132		2.170	Badan Penghubung

	BMD														
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Periode Pembayaran Polis Asuransi Kendaraan dan Gedung	205.500	2 Kali	207.900	2 Kali	232.848	2 Kali	267.775	2 Kali	307.941	2 Kali	354.132	10 Kali	1.370	Badan Penghubung
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	2 Laporan	200.000	2 Laporan	200.000	2 Laporan	200.000	2 Laporan	200.000	10 Laporan	800.000	Badan Penghubung
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Kepegawaian	-		63.140		136.505		156.981		180.528		207.607		744.763	Badan Penghubung
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	88 Paket	63.140	100 Paket	81.065	110 Paket	93.225	120 Paket	107.209	130 Paket	123.290	431 Paket	467.930	Badan Penghubung
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	8 Orang	55.440	10 Orang	63.756	12 Orang	73.319	15 Orang	84.317	45 Orang	276.832	Badan Penghubung
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	1.705		2.475		2.832		3.257		3.745		4.307		16.618	Badan Penghubung

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28.253	13 Paket	48.762	15 Paket	54.614	17 Paket	62.806	19 Paket	72.227	21 Paket	83.061	85 Paket	321.473	Badan Penghubung
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	125.921	44 Paket	385.861	44 Paket	443.740	44 Paket	510.302	44 Paket	586.847	44 Paket	674.874	220 Paket	2.601	Badan Penghubung
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	717.292	300 Paket	492.631	400 Paket	600.130	500 Paket	690.150	600 Paket	793.673	700 Paket	912.724	2500 Paket	3.489	Badan Penghubung
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	27.252	25 Paket	48.119	25 Paket	53.893	25 Paket	61.977	25 Paket	71.274	25 Paket	81.965	125 Paket	317.229	Badan Penghubung
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	806.685	950 Laporan	1.500	1200 Laporan	1.680	1300 Laporan	1.932	1400 Laporan	2.221	1500 Laporan	2.555	6350 Laporan	9.888	Badan Penghubung
Pengadaan Barang Milik	Persentase Pengadaan	310.000		831.657		2.264		2.351		2.452		2.568		10.469	Badan Penghubung

Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi														ung
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	310.000	1 Unit	310.000	3 Unit	1.680	3 Unit	1.680	3 Unit	1.680	3 Unit	1.680	13 Unit	7.030	Badan Penghubung
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	10 Paket	88.555	10 Paket	99.181	10 Paket	114.058	10 Paket	131.167	10 Paket	150.842	50 Paket	583.805	Badan Penghubung
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	39 Unit	433.102	39 Unit	485.074	39 Unit	557.835	39 Unit	641.510	39 Unit	737.737	195 Unit	2.855	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi	2.785		3.080		3.541		4.072		4.683		5.386		16.080	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	132.100	13 Laporan	89.454	13 Laporan	102.872	13 Laporan	118.303	13 Laporan	136.048	13 Laporan	156.456	65 Laporan	467.086	Badan Penghubung

	Jasa Surat Menyurat														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.466	12 Laporan	1.564	12 Laporan	1.800	12 Laporan	2.070	12 Laporan	2.380	12 Laporan	2.737	60 Laporan	8.171	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96.431	13 Laporan	101.754	13 Laporan	113.965	13 Laporan	131.059	13 Laporan	150.718	13 Laporan	173.326	65 Laporan	520.106	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.090	30 Laporan	1.325	30 Laporan	1.524	30 Laporan	1.753	30 Laporan	2.016	30 Laporan	2.318	150 Laporan	6.921	Badan Penghubung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah terpenuhi	1.029		3.518		4.217		4.849		5.577		6.413		18.163	Badan Penghubung

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	4 Unit	179.360	4 Unit	206.264	4 Unit	237.203	4 Unit	272.784	12 Unit	622.827	Badan Penghubung
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	588.960	23 Unit	1.146	26 Unit	1.332	29 Unit	1.532	32 Unit	1.762	35 Unit	2.027	110 Unit	5.775	Badan Penghubung
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	196.884	10 Unit	843.065	10 Unit	944.232	10 Unit	1.085	10 Unit	1.248	10 Unit	1.436	50 Unit	4.121	Badan Penghubung
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/n	243.242	4 Unit	1.528	4 Unit	1.760	4 Unit	2.024	4 Unit	2.328	4 Unit	2.677	20 Unit	7.643	Badan Penghubung

	Direhabilitasi														
II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Nilai IKM	499.403	-	962.859		1.306	-	1.502	-	1.727	-	1.986	-	7.485	Badan Penghubung
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1. Persentase Peningkatan Layanan Penghubung 2. Persentase layanan promosi seni budaya 3. Persentase fasilitasi pelayanan pimpinan	499.403		962.859		1.306		1.502		1.727		1.986		7.485	Badan Penghubung
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	-	-	-	5 Laporan	55.000	5 Laporan	63.250	5 Laporan	72.737	5 Laporan	83.648	20 Laporan	274.635	Badan Penghubung
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	83.238	5 Laporan	160.250	7 Laporan	179.480	9 Laporan	206.402	11 Laporan	237.363	13 Laporan	272.967	45 Laporan	1.056	Badan Penghubung
Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk	Jumlah Laporan Hasil Promosi	416.165	20 Laporan	802.609	20 Laporan	961.841	20 Laporan	1.106	20 Laporan	1.272	20 Laporan	1.462	100 Laporan	5.605	Badan Penghubung

Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan														bung
Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-	-	-	5 Kali	55.000	5 Kali	63.250	5 Kali	72.737	5 Kali	83.648	20 Kali	274.635	Badan Penghubung
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-	-	5 Laporan	55.000	5 Laporan	63.250	5 Laporan	72.737	5 Laporan	83.648	20 Laporan	274.635	Badan Penghubung
		13.685		18.616		23.236		26.440		30.124		34.361		121.682	

Sumber : Bapedaprov. Jambi .Oktober 2025. Data Diolah.

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengacu kepada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berangkat dari Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, maka Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni indikator kondisi positif yang ingin diwujudkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Penghubung
2. Nilai SAKIP
3. Persentase Peningkatan Target Realisasi Penerimaan Retribusi

Adapun Target IKU dan Kondisi Akhir IKU pada tahun 2026 yang ingin dicapai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.2.

Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Nilai IKM	83,7	83,8	84	84,05	84,10	84,15	84,2	84,2
		Pesentase pelayanan Penghubung yang optimal	66,7	71,7	76,7	80	82,5	84	86,5	86,5
		Nilai AKIP	70,4	70,7	70,75	70,8	70,85	70,9	70,95	70,95
		Persentase peningkatan Target realisasi Penerimaan Retribusi	33,5	14,4	14,8	15	15,3	15,5	15,8	15,8
		Hasil Monev keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	8	70,01	71	72	73	74	75	75

Sumber : Bapegdaprov. Jambi Oktober 2025. Data Diolah.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan penghubung	Nilai IKM	$IKM = \left(\frac{\sum \text{Nilai per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 25$ <p>Sesuai dengan hasil survey (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017)</p>	1. Biro Organisasi 2. Badan Penghubung	
		Persentase Pelayanan Penghubung yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> Indikator jumlah kunjungan ke anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia, Jumlah pelayanan terhadap pimpinan yang difasilitasi dan dilakukan ke Kementerian dan Lembaga serta jumlah responden yang menginap Mess Jambi 	Badan Penghubung	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Kategori Reformasi Birokrasi; yaitu AA (nilai > 90), A (nilai > 80), BB (nilai > 70), B (nilai > 60), CC (nilai > 50), C (nilai > 30), dan D (nilai 0-30). Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 	Inspektorat Daerah	
		Persentase Peningkatan Target Realisasi Penerimaan Retribusi	Target Realisasi Tahun Berjalan dikurangi Target Realisasi Tahun Sebelumnya dibagi Target Realisasi Tahun Sebelumnya dikali 100%	Badan Penghubung	
		Hasil monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	Hasil penilaian komisi Informasi Provinsi Jambi	Badan Penghubung	

Sumber : Bapedaprovjambi.Oktobre2025. Data diolah.

4.4 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.4
 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi,
 Tahun 2025–2029

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>out come</i>)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (<i>out put</i>)
5.07.01	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	1. Nilai AKIP 2. Persentase Peningkatan Target Penerimaan Retribusi 3. Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	-
5.07.01.1.01		1.1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.07.01.1.01.0001			1.1.1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.07.01.1.01.0007			1.1.2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.07.01.1.02		1.2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang difasilitasi
5.07.01.1.02.0001			1.2.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	JumlahOrang yangMenerima Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01.1.02.0002			1.2.2.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.07.01.1.03		1.3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase Penataan Administrasi BMD
5.07.01.1.03.0002			1.3.1.Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Periode Pembayaran Polis Asuransi Kendaraan dan Gedung
5.07.01.1.03.0006			1.3.2.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.07.01.1.05		1.4.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah			Persentase layanan administrasi Kepegawaian
5.07.01.1.05.0002			1.4.1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
5.07.01.1.05.0009			1.4.2.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
5.07.01.1.06		1.5.Administrasi Umum Perangkat daerah			Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01.1.06.0001			1.5.1.Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.06.0002			1.5.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.06.0004			1.5.3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.06.0005			1.5.4.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
5.07.01.1.06.0009			1.5.7.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.07.01.1.07		1.6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi
5.07.01.1.07.0002			1.6.1.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
5.07.01.1.07.0005			1.6.2.Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01.1.07.0006			1.6.3.Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
5.07.01.1.08		1.7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi
5.07.01.1.08.0001			1.7.1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.07.01.1.08.0002			1.7.2.Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5.07.01.1.08.0003			1.7.3.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.08.0004			1.7.4.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.07.01.1.09		1.8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah terpenuhi
5.07.01.1.09.0001			1.8.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.01.1.09.0002			1.8.2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
5.07.01.1.09.0006			1.8.3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5.07.01.1.09.0009			1.8.4.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.07.02	2.Program Pelayanan Penghubung			Nilai IKM	
5.07.02.1.01		2.1.Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			1. Persentase Peningkatan Layanan Penghubung 2. Persentase layanan promosi seni budaya 3. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pimpinan
5.07.02.1.01.0001			2.1.1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan

Kode Rek.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (out put)
5.07.02.1.01.0002			2.1.2.Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
5.07.02.1.01.0003			2.1.3.Peningkatan fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan
5.07.02.1.01.0004			2.1.4.Kegiatan fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5.07.02.1.01.0005			2.1.5.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Sumber: Bapegdaprov. Jambi. April 2025. Data Diolah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dibawah koordinasi Bappeda Provinsi Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) ini menguraikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang juga merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang strategis guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai tujuan organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) yang akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan **JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT** .

Keberhasilan pelaksanaan Ranhir (Renstra) Perubahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh komponen dalam organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, kerjasama dan koordinasi yang baik sesama Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi serta masyarakat.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini disusun, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.